

**TESIS**

**DETERMINAN PEMBELANJAAN MODAL DALAM ANGGARAN PEMERINTAH  
DAERAH  
(STUDI EMPIRIS di KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH)**



Disusun Oleh:

Faikar Hudiya (21919010)

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

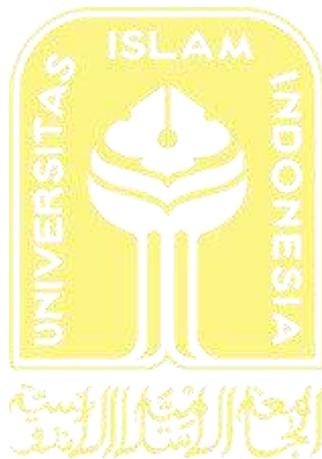
“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar pascasarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, Juni 2024



Faikar Hudiya

**HALAMAN PENGESAHAN**



Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arief Rahman', is placed below the title 'Dosen Pembimbing'.

Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

## BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

**FAIKAR HUDIYA**

No. Mhs. : 21919010

Konsentrasi : Akuntansi Pemerintahan

Dengan Judul:

**DETERMINAN PEMBELANJAAN MODAL DALAM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS di KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH)**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,  
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

Penguji II



Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res., Ph.D., Ak., CA.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

## MOTTO

**Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Allah sajalah engkau berharap.**

**(QS. Asy-Syarah: 6-8)**

**Maha Suci Allah yang menguasai (segala) kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa diantaramu yang lebih baik amalnya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Allah yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Allah Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi (dan) sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dan pandanganmu dalam keadaan letih.**

**(QS Al-Mulk: 1-4)**

**”Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan dan kemudahan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Dan jika ia mendapatkan kesulitan dan kesempitan, maka ia bersabar dan itu pun baik baginya.”**

**(HR. Muslim, No. 2999)**

**”Tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tak ada obat yang tak berguna selain kurangnya pengetahuan.”**

**(Ibnu Sina)**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Asslamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu,*

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya serta segala kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Determinan Pembelanjaan Modal dalam Anggaran Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW. Penyusunan penelitian ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan oleh penelitian-penelitian berikutnya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberi rahmat dan ridho yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan umat muslim yang penuh dengan kemuliaan dan ketaatan kepada Allah SWT.
3. Kedua orangtua penulis yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta senantiasa memberikan nasihat, bimbingan, dukungan, dan doa yang tidak pernah berhenti diberikan untuk penulis.
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA., Cert.IPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dekar Urumsah, S.E., S.Si., M.Com.(IS)., Ph.D., CFrA selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

7. Bapak Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia dan selaku dosen pembimbing tesis yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan ilmu, masukan, dan motivasi dengan penuh kesabaran kepada penulis selama proses penyusunan penelitian ini.
  8. Seluruh dosen Program Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang telah diberikan sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti dan menjadi bekal dalam pembuatan penelitian ini.
  9. Sahabat serta teman yang mendukung penyelesaian penelitian ini dengan dukungan semangat di tengah tantangan yang tidak terpikirkan sebelumnya yaitu Hilmy Pradana S. dan Bram.
  10. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
- Semoga apa yang telah diberikan kepada penulis, menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah SWT dan semoga Allah meridhoi dan mengabulkan doa dan harapan kita. Aamiin.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, Februari 2024

Faika Hudiya

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	2
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	3
<b>BERITA ACARA</b> .....	4
<b>MOTTO</b> .....	5
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	6
<b>DAFTAR ISI</b> .....	8
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	10
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	11
<b>ABSTRAK</b> .....	12
<b>ABSTRACT</b> .....	13
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	14
I.1 Latar Belakang.....	14
I.2 Rumusan Masalah.....	16
I.3 Tujuan Penelitian.....	16
I.4 Manfaat Penelitian.....	16
I.5 Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	18
II.1 Landasan Teori.....	18
II.1.1 Teori Keagenan.....	18
II.1.2 Pemerintah Daerah.....	19
II.1.3 Anggaran Daerah.....	19
II.1.4 Belanja Modal.....	20
II.2 Penelitian Terdahulu.....	21
II.2.1 Dana Alokasi Khusus (DAK).....	26
II.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU).....	27
II.2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	28
II.2.4 Dana Bagi Hasil (DBH).....	28
II.2.5 Ukuran Kabupaten/Kota.....	29
II.3 Kerangka Penelitian.....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	33
III.1 Populasi dan Sampel.....	33
III.2 Definisi Variabel Penelitian.....	34

III.3 Model Penelitian.....	36
III.4 Metode Analisa.....	37
<b>BAB IV ANALISIS dan PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
IV.1 Statistik Deskriptif.....	41
IV.2 Estimasi Model Regresi Data Panel.....	43
IV.3 Uji Asumsi Klasik.....	45
IV.4 Uji Hipotesis.....	48
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
V.1 Kesimpulan.....	58
V.2 Implikasi Penelitian.....	58
V.3 Keterbatasan.....	59
V.4 Penelitian Masa Akan Datang.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2. 1 Variabel Bebas dan Hasil Penelitian Terdahulu</b> .....	22
<b>Tabel 3. 1 Hasil Pengambilan Sampel Purposive</b> .....	34
<b>Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif</b> .....	42
<b>Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow</b> .....	44
<b>Tabel 4. 3 Hasil Hausman Test</b> .....	45
<b>Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas</b> .....	47
<b>Tabel 4. 5 Hasil Estimasi Fixed Effect Model</b> .....	47
<b>Tabel 4. 6 Hasil Uji Glejser</b> .....	48
<b>Tabel 4. 7 Hasil Regresi Fixed Effect Model</b> .....	49
<b>Tabel 4. 8 Koefisien Determinasi</b> .....	50
<b>Tabel 4. 9 Hasil Uji F-Statistik</b> .....	51
<b>Tabel 4. 10 Hasil Uji t Statistik Variabel X1</b> .....	52
<b>Tabel 4. 11 Hasil Uji t Statistik Variabel X2</b> .....	53
<b>Tabel 4. 12 Hasil Uji t Statistik Variabel X3</b> .....	54
<b>Tabel 4. 13 Hasil Uji t Statistik Variabel X4</b> .....	55
<b>Tabel 4. 14 Hasil Uji t Statistik Variabel X5</b> .....	56
<b>Tabel 4. 15 Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis t Statistik</b> .....	57

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2. 1 Skema Arah Penelitian Sekarang.....</b>	<b>31</b>
--	-----------

## ABSTRAK

Penelitian ini menguji berbagai determinan belanja modal dalam penganggaran pemerintah daerah. Penelitian menggunakan sampel sebanyak 70 Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Penelitian menggunakan regresi data panel dengan periode penelitian dari tahun 2015 – 2019. Anggaran Dana Alokasi Khusus dan Anggaran Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Anggaran Belanja Modal, sedangkan Anggaran Dana Alokasi Umum, Anggaran Dana Bagi Hasil dan Ukuran Kota/Kabupaten tidak memiliki pengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. Penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan tentang determinan belanja modal dalam penganggaran pemerintah daerah. Kedua, penelitian ini menambah pemahaman tentang bagaimana pemerintah bekerja dengan kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada mereka.

**Kata Kunci:** belanja modal, akuntansi sektor publik, anggaran

## **ABSTRACT**

*This study investigates determinants of regional capital expenditure in regional government budget. This study uses sample of 70 cities and regencies in Central Java Province in Indonesia. This study uses a data panel regression with 2015 to 2019 period of research. Special Allocation Fund Budget and Regional Revenue Budget have positive influence to Regional Capital Expenditure Budget, while General Allocation Fund Budget, Revenue Sharing Fund Budget and Size of City/Regency do not have impact on Regional Capital Expenditure Budget. First, this paper contributes to aggregate of knowledge of capital expenditure on regional budgeting. Secondly, analysing determinants of capital expenditure on regional capital budgeting add us further insights and suggestions on how the government work with their authority associated with citizen's trust given to them.*

**Keywords:** *capital expenditure, public sector accounting, budget*

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Fenomena dana pemerintah daerah (pemda) mengendap hingga berjumlah triliunan rupiah diberitakan melalui laman [kalbar.bpk.go.id](http://kalbar.bpk.go.id) tertanggal 22 Oktober 2022. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengeluhkan dana pemda tersebut seharusnya dapat diakselerasi pelaksanaannya agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Dalam berita tersebut diinformasikan bahwa dana mengendap Pemda sampai akhir bulan September 2022 mencapai Rp223,8 triliun. Jumlah tersebut bahkan naik dibandingkan bulan September 2021 yang hanya berjumlah Rp194,12 triliun. Dana mengendap tersebut juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau Agustus 2022 hingga mencapai 10,04% atau sebesar Rp20,41 triliun seperti yang tertulis dalam laman pemberitaan tersebut.

Keluhan Sri Mulyani dalam berita di atas sangat jelas bahwa pemda berjalan lambat dalam merealisasikan dana yang dimilikinya untuk pembangunan kepentingan masyarakat. Upaya-upaya pemda untuk meningkatkan penerimaan daerah selama ini kurang diikuti dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik (Halim & Abdullah, 2003). Pelayanan publik yang dimaksud Halim dan Abdullah (2003) yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam membantu tugas dari pemerintah pusat adalah urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta sosial sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan dalam pasal 18 ayat 1.

Contoh pelayanan publik sesuai bunyi pasal di atas adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan salah satu tugas dari Pemerintah Daerah pada pasal 30 ayat 3 yaitu "Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh pihak pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta". Sedangkan ayat 1 yang disebutkan dalam ayat 3 undang-undang tersebut berbunyi fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat. Pemerintah untuk dapat menyelenggarakan Pelayanan Dasar berupa fasilitas kesehatan sesuai undang-undang di atas pasti membutuhkan dana dalam bentuk belanja modal pembangunan infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan program-program lain yang menunjang tersedia dan terselenggaranya fasilitas kesehatan untuk kepentingan publik.

Penelitian sebelumnya dari Dorn et al., (2021) menyatakan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dapat diubah dari peruntukan belanja operasional ke belanja modal seperti pembangunan sekolah dan jalan sebagai wujud penganggaran yang berkelanjutan. Penelitian lain dari Haraldsson (2022) menyatakan bahwa pada tingkat pemerintah daerah, belanja modal dapat dilihat sebagai ambisi politis dan janji pemerintah sebagai pengelola daerah dalam memberikan kesejahteraan masyarakat di masa akan datang sekaligus memengaruhi kondisi kehidupan masyarakat, perkembangan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Belanja modal dalam bentuk belanja infrastruktur transportasi seperti pembangunan jalan, stasiun dan rel kereta api, bandara, pelabuhan, jembatan dan infrastruktur lain untuk kepentingan publik seringkali terjadi *cost overruns* saat proyek pembangunan dilaksanakan karena banyaknya informasi yang tidak tepat tentang *cost* dan *benefit* ketika proses perencanaan pembangunan proyek tersebut (Cantarelli et al., 2008).

Berdasarkan uraian di atas, ketentuan undang-undang yang mengatur belanja modal baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta beberapa pernyataan dari peneliti terdahulu yang menyatakan bahwa belanja modal digunakan untuk kepentingan publik terjadi deviasi dalam praktik belanja modal yang dilakukan khususnya pemerintah daerah, maka penulis mengambil judul “**Determinan Pembelanjaan Modal dalam Anggaran Pemerintah Daerah**”. Penelitian ini menjadi penting karena mengambil ruang lingkup anggaran daerah yang belum banyak diteliti seperti kebanyakan penelitian sebelumnya yang mengambil aspek realisasi belanja modal. Banyak literatur penelitian tentang determinan deviasi penganggaran menggunakan angka realisasi dan tidak mengambil angka perencanaan (*forecasting*) sebagai variabel dependen (Benito et al., 2015). Penelitian ini berkontribusi dalam terbatasnya penelitian bertema belanja modal (Haraldsson, 2022). Penelitian ini juga mengambil variabel bebas baru berupa ukuran kabupaten/kota untuk berkontribusi dalam kebaruan *novelty* penelitian. Hal ini dikarenakan variabel bebas ukuran kabupaten/kota dengan *proxy* jumlah populasi kabupaten/kota belum pernah diteliti pada penelitian terdahulu sebagai variabel bebas yang berdiri sendiri sebagai determinan yang memengaruhi variabel dependen berupa anggaran belanja modal.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah oleh peneliti dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang adalah apa saja determinan yang memengaruhi penganggaran belanja modal oleh Pemerintah Daerah. Determinan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. Apakah Anggaran Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal?
2. Apakah Anggaran Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal?
3. Apakah Anggaran Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal?
4. Apakah Anggaran Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal? dan
5. Apakah Ukuran Kabupaten/Kota (*municipal size*) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari dasar rumusan penelitian di atas adalah mengetahui determinan yang memengaruhi penganggaran belanja modal oleh Pemerintah Daerah serta arah pengaruh hubungan determinan tersebut pada penganggaran belanja modal oleh Pemerintah Daerah.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Pusat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan tambahan informasi bagi pemerintah pusat tentang apa saja faktor yang memengaruhi keputusan jenis belanja modal dan prioritasnya di pemerintah daerah. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perumusan kebijakan pemerintah pusat dalam mengatur aktivitas belanja modal pemerintah daerah agar pembangunan masyarakat dapat tercapai sesuai tujuan nasional.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian diharapkan dapat dirasakan manfaatnya secara tidak langsung oleh masyarakat karena penelitian ini adalah salah satu usaha untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di daerah yang belum maksimal. Penelitian ini ditujukan

salah satunya untuk membentuk paket kebijakan pemerintah pusat sesuai uraian di atas agar tujuan nasional dapat tercapai sesuai cita-cita bangsa.

### 3. Bagi Peneliti dan Akademisi

Penelitian diharapkan memberikan referensi bagi akademisi dan peneliti dengan tujuan penyempurnaan kajian-kajian lebih lanjut dari yang sudah pernah diteliti sebelumnya.

## **I.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum penelitian serta memandu pembaca dalam memahami permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini membahas berbagai teori dan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini serta hipotesis yang diuji.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode penelitian, variable penelitian, dan metode analisis data.

### **BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan hasil dan analisis berisi deskripsi objek penelitian, analisis data yang terkait dengan analisis statistik deskriptif dan analisis model regresi, serta interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan dan pencapaian tujuan penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **II.1 Landasan Teori**

##### **II.1.1 Teori Keagenan**

Teori keagenan dijelaskan oleh Jensen & Meckling (1976) dengan mendefinisikan operator perusahaan disebut sebagai agen atau manajemen dan pemilik saham atau pemilik perusahaan sebagai prinsipal. Dalam teori tersebut dijelaskan hubungan antara operator perusahaan dengan pemilik perusahaan terdapat konflik keagenan yang disebabkan perilaku operator perusahaan atau manajemen tidak sesuai dengan tujuan dari para pemilik perusahaan yaitu memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 65 ayat 1 disebutkan salah satu tugas Kepala Daerah adalah memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Sedangkan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 95 disebutkan DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah provinsi. Dalam ruang lingkup sektor publik sesuai dengan bunyi pasal-pasal dalam UU No. 23 Tahun 2014 di atas, hubungan antara pemerintah dengan rakyat di suatu sistem pemerintahan sebuah negara dapat dianalogikan sebagai hubungan manajemen atau operator dengan pemilik perusahaan dalam konteks sektor privat. Manajemen atau operator pada hubungan tersebut adalah pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah untuk sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemilik adalah rakyat Indonesia yang diwakili oleh DPR atau DPRD. Menurut Nurhidayati dan Yaya (2013) benturan kepentingan antara eksekutif sebagai agen atau manajemen dengan legislatif sebagai prinsipal yaitu salah satunya adalah masing-masing pihak mementingkan pihaknya untuk memaksimalkan kesejahteraan. Konflik keagenan yang terjadi dalam pemerintahan disebabkan oleh asimetri informasi berupa informasi birokrasi, administrasi, serta aturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemerintahan didominasi oleh eksekutif dibandingkan dengan legislatif (Nurhidayati & Yaya, 2013).

### **II.1.2 Pemerintah Daerah**

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian dari Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pasal 57 dalam undang-undang di atas juga menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Dalam pasal tersebut disebutkan juga bahwa salah satu tugas dari kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Penjelasan tentang tugas Kepala Daerah tersebut menegaskan bahwa kepala daerah berperan dalam mengajukan anggaran dan mengelola jalannya pemerintahan daerah yang dapat dianalogikan pada teori keagenan sebagai manajemen atau operator.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 definisi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Berdasarkan definisi di atas, maka DPRD adalah wakil rakyat dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, analogi DPRD sebagai prinsipal dalam teori keagenan telah menjelaskan sesuai dengan definisi di atas.

### **II.1.3 Anggaran Daerah**

Anggaran adalah perencanaan keuangan di masa depan (Hansen & Mowen, 2007). Setiap entitas yang berfokus pada laba dan non-laba menggunakan anggaran untuk melakukan perencanaan dan pengendalian (Hansen & Mowen, 2007). Anggaran negara adalah gambaran dari kebijaksanaan pemerintah yang dinyatakan dalam ukuran uang yang meliputi baik kebijaksanaan pengeluaran pemerintah untuk suatu periode di masa depan maupun kebijaksanaan penerimaan pemerintah untuk menutup pengeluaran tersebut (Baswir, 2000). Sedangkan, menurut definisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Jensen & Meckling (1976) jika pemilik perusahaan dan manajemen sama-sama bertujuan memaksimalkan kepentingannya masing-masing, maka dapat dipastikan manajemen tidak akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, tahap perencanaan merupakan tahap yang sangat krusial

(Mahmudi, 2019). Peran DPRD dan masyarakat dalam tahap perencanaan ini sangat besar (Mahmudi, 2019). Output dari tahap perencanaan ini adalah berupa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi APBD (Mahmudi, 2019).

Pasal 65 ayat 1 (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Pada Pasal 96 dan Pasal 149 UU No 23 Tahun 2014 yang memuat fungsi anggaran dari DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota menjalankan fungsi tersebut bersama dengan Kepala Daerah untuk menyetujui APBD dan sebelum menyetujui APBD yang telah dibuat dan diusulkan oleh Kepala Daerah, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota harus menjangar aspirasi dari masyarakat.

Menurut Haraldsson (2022) anggaran harus berisi informasi tentang rencana kegiatan atau aktivitas dan pengelolaan ekonomi selama tahun fiskal serta informasi tentang tarif pajak dan alokasi pendanaan. Selanjutnya Haraldsson (2022) menyatakan bahwa anggaran belanja dibagi menjadi dua yaitu anggaran untuk belanja operasional dan belanja modal.

#### **II.1.4 Belanja Modal**

Belanja modal untuk pelayanan publik adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset) yang ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana publik yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat (Nurhidayati & Yaya, 2013). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bab Kelima tentang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Paragraf Kedua menyatakan pada Pasal 298 bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Urusan Pemerintahan Wajib pada bunyi pasal di atas merujuk pada Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 adalah Urusan Pemerintahan yang Wajib diselenggarakan oleh semua Daerah, sedangkan Pelayanan Dasar sesuai dengan bunyi pada pasal dan bab yang sama yaitu pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar berupa pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial sesuai bunyi Pasal 12 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014.

Haraldsson (2022) menyatakan bahwa anggaran belanja yang dibuat oleh pemerintah daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu anggaran belanja operasional dan anggaran belanja modal. Contoh belanja modal yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah penjelasan dalam lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang pembagian urusan pemerintahan seperti urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang disebutkan bahwa urusan pemerintah daerah adalah salah satunya menyelenggarakan infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah provinsi, kota maupun kabupaten.

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

## II.2 Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka terutama pada hasil penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk menuntun pemikiran penelitian yang dilakukan oleh peneliti kemudian. Penelitian terdahulu telah memberikan hasil dan manfaat pada masa tertentu terhadap fenomena yang diteliti pada saat itu.

Bagi peneliti sekarang, hasil terdahulu perlu dikaji dan diperhatikan secara seksama agar penelitian yang dilakukan lebih terstruktur dan memenuhi syarat kebaruan *novelty*. Penelitian terdahulu baik model dan hasil memberikan informasi kepada peneliti sekarang untuk dapat menemukan *path* dan sesuatu yang baru sehingga dapat memberikan nilai tambah atas penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu. Informasi yang dapat diambil oleh peneliti sekarang berupa variabel bebas baru yang belum diangkat oleh penelitian terdahulu termasuk kerangka berpikir atas hubungan sebab akibat variabel terikat yang dipengaruhi oleh beragam variabel bebas.

Kajian pustaka terdahulu juga memberikan manfaat bagi peneliti kemudian dan terdahulu agar hasil penelitian tidak saling tumpang tindih dan terlihat perbedaan sehingga masing-masing peneliti terjaga keaslian hasil penelitiannya. Masalah keaslian tersebut sangat erat kaitannya jika peneliti kemudian mengambil tema penelitian yang telah banyak dikaji oleh para peneliti sebelumnya.

Kajian terdahulu juga memberikan dasar teori bagi peneliti sekarang agar landasan berpikir untuk mencari tahu sebab akibat dari hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak abstrak serta memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Berikut tabel 2.1

yang memberikan informasi kajian-kajian terdahulu dengan tema penelitian faktor-faktor yang memengaruhi belanja modal dalam anggaran pemerintah daerah sesuai dengan tema penelitian ini.

**Tabel 2. 1 Variabel Bebas dan Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Variabel Bebas	Hasil Penelitian dan Peneliti
1	Kemandirian Daerah	- Bahwa variabel kemandirian daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap porsi belanja daerah (Nurhidayati & Yaya, 2013).
2	Efektivitas Keuangan Daerah	- Variabel efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap porsi belanja daerah (Nurhidayati & Yaya, 2013).
3	Efisiensi Keuangan Daerah	- Variabel efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap porsi belanja modal (Nurhidayati & Yaya, 2013).
4	SiLPA ( <i>Surplus of Financing Budget</i> )	- Variabel SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal (Sugiardi & Supadmi, 2014). - SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal (Nuzana & Riharjo, 2016). - Variabel SiLPA berpengaruh negatif terhadap porsi belanja modal (Nurhidayati & Yaya, 2013). - Variabel SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan realisasi belanja modal pemerintah (Mutiah & Mappanyuki, 2015).
5	DAU ( <i>General Allocation Fund</i> )	- DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Sugiardi & Supadmi, 2014), (Tuasikal, 2008), (Permatasari & Mildawati, 2016), (Nurzen & Riharjo, 2016), (Juniawan & Suryantini, 2018).

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal (Heliyanto &amp; Handayani, 2016).</li> <li>- DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal (Mufida &amp; Suryono, 2016).</li> <li>- Variabel DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap porsi belanja modal (Nurhidayati &amp; Yaya, 2013), (Nuzana &amp; Riharjo, 2016), (Wandira, 2013).</li> <li>- DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal (Sholikhah &amp; Wahyudin, 2014).</li> <li>- Variabel DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan belanja modal (Mutiah &amp; Mappanyuki, 2015).</li> </ul>
6	Pendapatan Asli Daerah (PAD)/ <i>Regional Revenue</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Sugiardi &amp; Supadmi, 2014), (Tuasikal, 2008), (Nuzana &amp; Riharjo, 2016), (Rizal &amp; Erpita, 2019), (Mufida &amp; Suryono, 2016), (Permatasari &amp; Mildawati, 2016), (Nurzen &amp; Riharjo, 2016), (Sholikhah &amp; Wahyudin, 2014), (Juniawan &amp; Suryantini, 2018), (Pelealu, 2013).</li> <li>- Variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal (Heliyanto &amp; Handayani, 2016).</li> <li>- PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal (Wandira, 2013).</li> <li>- PAD berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan belanja modal pemerintah (Mutiah &amp; Mappanyuki, 2015).</li> </ul>
7	<i>Change in Accounting Standards</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa perubahan standar akuntansi berpengaruh negatif terhadap belanja modal (<i>capital expenditures</i>) (Dorn et al., 2021).</li> </ul>

8	<i>Implemented Accrual Accounting in Municipalities</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa implelementasi standar akuntansi pemerintah akrual berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>investment expenditure</i> (Christofzik, 2019).</li> </ul>
9	DAK ( <i>Special Allocation Fund</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Tuasikal, 2008), (Mufida &amp; Suryono, 2016), (Permatasari &amp; Mildawati, 2016), (Wandira, 2013), (Juniawan &amp; Suryantini, 2018), (Pelealu, 2013).</li> <li>- DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal (Nuzana &amp; Riharjo, 2016).</li> <li>- Variabel DAK berpengaruh positif terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal (Heliyanto &amp; Handayani, 2016).</li> <li>- Variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan belanja modal (Mutiah &amp; Mappanyuki, 2015).</li> </ul>
10	PDRB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel PDRB berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (Sugiardi &amp; Supadmi, 2014).</li> <li>- PDRB berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal (Tuasikal, 2008).</li> </ul>
11	Dana Bagi Hasil (DBH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel DBH memiliki pengaruh positif signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal (Heliyanto &amp; Handayani, 2016).</li> <li>- DBH memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. (Permatasari &amp; Mildawati, 2016), (Sholikhah &amp; Wahyudin, 2014), (Wandira, 2013).</li> <li>- DBH memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal (Nuzana &amp; Riharjo, 2016).</li> </ul>
12	Pertumbuhan Ekonomi (PE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel PE memiliki pengaruh negatif terhadap belanja modal (Nurzen &amp; Riharjo, 2016).</li> </ul>

13	Luas Wilayah Daerah	- Variabel Luas Wilayah Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal (Sholikhah & Wahyudin, 2014).
14	<i>Debt sustainability</i>	- Variabel independen <i>debt sustainability</i> memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal pemerintah (Bacchiocchi et al., 2011). - Variabel <i>debt sustainability</i> memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal relatif pemerintah khususnya bidang pendidikan di negara OECD (Bacchiocchi et al., 2011).
15	Karakteristik Pemerintah Daerah ( <i>Characteristic of Local Government</i> )	- Variabel karakteristik Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap keputusan belanja modal pemerintah (Mutiah & Mappanyuki, 2015).
16	<i>External environment (municipal size, tax base, tax rate and fee level)</i>	- Variabel <i>external environment (municipal size, tax base, tax rate and fee level)</i> memengaruhi deviasi belanja modal <i>municipal</i> khususnya sektor pengairan dan saluran pembuangan (Haraldsson, 2022).

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belanja modal pemerintah baik pusat maupun daerah. Teori yang menjadi dasar penelitian ini diambil dari teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976). Jensen & Meckling (1976) menjelaskan definisi hubungan keagenan adalah kontrak antara pihak pemilik perusahaan dengan pihak lain sebagai manajemen perusahaan dimana pemilik perusahaan tersebut memberikan sebagian kewenangan kepada manajemen perusahaan yang ditunjuknya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Jika para pihak dalam hubungan keagenan berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing, maka manajemen perusahaan dapat bertindak tidak sesuai dengan kepentingan dari pemilik perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Teori tersebut menjelaskan setiap hubungan antar pemilik perusahaan dengan operator perusahaan menimbulkan konflik kepentingan karena masing-masing pihak saling

berkompetisi untuk memenuhi kepentingan individunya. Hubungan keagenan dan konflik yang terjadi didasarkan pada sifat dasar manusia yaitu manusia yang mementingkan diri sendiri, manusia yang sangat terbatas akan persepsi di masa akan datang (*bounded rationality*) serta manusia yang selalu menghindari risiko (Eisenhardt, 1989). Hasil penelitian tersebut menguatkan definisi hubungan keagenan dan konflik kepentingan masing-masing pihak dari pemilik perusahaan dan manajemen sebagai operator perusahaan.

Hubungan keagenan dan konflik ini dapat dianalogikan sebagai hubungan antar pihak yang berkepentingan di struktur organisasi sektor publik. Analogi tersebut dijelaskan oleh Nurhidayati & Yaya (2013) sebagai benturan kepentingan antara eksekutif dengan legislatif dalam sistem pemerintahan khususnya di Indonesia. Bentuk hubungan keagenan dalam sistem pemerintahan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu ketika rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diajukan oleh setiap Kepala Daerah yang bertindak sebagai eksekutif dalam hal ini operator atau manajemen (gubernur, bupati dan walikota) kepada DPRD sebagai legislatif bertindak mewakili pemilik yaitu masyarakat untuk dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan dengan Perda APBD. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengembangkan kerangka berpikir dari beberapa penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang berfokus pada faktor penentu yang mencerminkan perilaku eksekutif dalam hubungan keagenan dengan legislatif khususnya dalam konteks penganggaran belanja modal.

### **II.2.1 Dana Alokasi Khusus (DAK)**

DAK menurut penelitian terdahulu berdasarkan hasil penelusuran menunjukkan hasil yang konsisten. Tuasikal (2008) menjelaskan hubungan DAK terhadap Belanja Modal adalah positif signifikan. Temuan dari Mufida & Suryono (2016), Permatasari & Mildawati (2016), Wandira (2013), Juniawan & Suryantini (2018) serta Pelealu (2013) menyatakan bahwa hubungan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil positif tapi tidak signifikan ditunjukkan oleh penelitian Nuzana & Riharjo (2016). Hasil penelitian yang agak sedikit berbeda adalah Heliyanto & Handayani (2016) yang menjelaskan hubungan positif DAK terhadap anggaran belanja modal bukan dari realisasi belanja modal. Penelitian lain dari Mutiah & Mappanyuki (2015) menyatakan bahwa keputusan belanja modal dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel DAK. Dana Alokasi Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah. Dari penjelasan definisi undang-undang dan sumber penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis pertama penelitian adalah sebagai berikut.

H1: Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah.

## **II.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)**

DAU (Dana Alokasi Umum) menunjukkan hasil tidak konsisten dari penelitian-penelitian sebelumnya terhadap Belanja Modal. Penelitian oleh Sugiardi & Supadmi (2014) menemukan hubungan positif dan signifikan antara variabel bebas DAU terhadap Belanja Modal. Penelitian lain dari Tuasikal (2008) juga memberikan hasil yang sama dengan penelitian Sugiardi & Supadmi (2014). Permatasari & Mildawati (2016), Nurzen & Riharjo (2016) serta Juniawan & Suryantini (2018) juga menguatkan hasil positif dan signifikan antara DAU terhadap belanja modal. Hasil penelitian dari Nurhidayati & Yaya (2013) memberikan hubungan sebaliknya yaitu variabel bebas DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap porsi belanja modal. Pengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal juga dikemukakan oleh Nuzana & Riharjo (2016). Wandira (2013) juga menemukan hasil negatif signifikan variabel DAU terhadap porsi belanja modal. Hasil penelitian lainnya menjelaskan hubungan antara DAU dengan alokasi anggaran belanja modal dimana DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal (Heliyanto & Handayani, 2016). Sedangkan penelitian lain terdahulu yang tidak signifikan dan berarah positif hubungan antara DAU dengan Belanja Modal adalah Mufida & Suryono (2016). Hubungan negatif tidak signifikan antara DAU dengan belanja modal diteliti oleh Solikhah & Wahyudin (2014). Keputusan belanja modal sangat dipengaruhi oleh variabel DAU dengan arah negatif menurut Mutiah & Mappanyuki (2015). Dana Alokasi Umum didefinisikan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dari penjelasan definisi undang-undang dan sumber penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua penelitian adalah sebagai berikut.

H2: Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah.

### **II.2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Sugiardi & Supadmi (2014) dijelaskan yaitu hubungan positif signifikan antara PAD terhadap Belanja Modal. Hubungan tersebut konsisten dengan Tuasikal (2008) yang menemukan hubungan positif antara PAD dalam memengaruhi belanja modal. Penelitian-penelitian terdahulu juga menguatkan hubungan positif signifikan dari Nuzana & Riharjo (2016), Rizal & Erpita (2019), Mufida & Suryono (2016), Permatasari & Mildawati (2016), Nurzen & Riharjo (2016), Solikhah & Wahyudin (2014), Juniawan & Suryantini (2018) serta Pelealu (2013). Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber murni daerah (Nurhidayati & Yaya, 2013). Variabel PAD ini memengaruhi secara signifikan dengan arah positif terhadap alokasi anggaran belanja modal menurut Heliyanto & Handayani (2016). Menurut Wandira (2013) PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Mutiah & Mappanyuki (2015) menyatakan bahwa PAD berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap keputusan belanja modal pemerintah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah yang didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Wandira, 2013). Dari penjelasan sumber penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis ketiga penelitian adalah sebagai berikut.

H3: Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah.

### **II.2.4 Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana Bagi Hasil memengaruhi alokasi anggaran belanja modal secara positif signifikan dijelaskan dalam penelitian Heliyanto & Handayani (2016). Hasil pengaruh positif signifikan DBH terhadap realisasi belanja modal diteliti oleh Permatasari & Mildawati (2016), Solikhah & Wahyudin (2014) serta Wandira (2013). Hasil tidak konsisten yaitu DBH memengaruhi secara negatif signifikan dijelaskan dalam penelitian Nuzana & Riharjo (2016). Dana Bagi Hasil menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari penjelasan sumber penelitian terdahulu yang didominasi hubungan positif antara Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal, maka dapat dirumuskan hipotesis keempat penelitian adalah sebagai berikut.

H4: Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah.

### II.2.5 Ukuran Kabupaten/Kota

Penelitian ini akan menggunakan variabel bebas baru dengan konteks penganggaran belanja modal pada pemerintahan daerah. Penelitian ini akan mengambil variabel bebas berupa ukuran kabupaten/kota. Variabel bebas berupa *external factors* diproksikan salah satunya dengan *municipal size* yang diukur dengan jumlah populasi (Haraldsson, 2022). Penelitian ini akan menggunakan proksi yang digunakan oleh Haraldsson (2022) berupa *municipal size* sebagai variabel bebas baru. Proksi dari variabel bebas baru tersebut masih akan menggunakan ukuran jumlah populasi di suatu daerah kabupaten/kota seperti penelitian dari Haraldsson (2022).

Penelitian sebelumnya menitik beratkan pada karakteristik pemerintah daerah yang diproksikan dengan jumlah penduduk suatu daerah untuk diuji hubungannya dengan variabel terikat realisasi belanja modal (Mutiah & Mappanyuki, 2015). Semakin besar ukuran kabupaten/kota meningkatkan kompleksitas dalam kabupaten/kota tersebut dan semakin memungkinkan peningkatan kerumitan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam membuat program dan merealisasikan investasi belanja modal (Haraldsson, 2022). Penelitian dalam bidang sektor publik khususnya fokus pada belanja modal masih sangat sedikit sehingga masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk menambahkan referensi baru di kemudian hari (Haraldsson, 2022). Berdasarkan temuan sumber penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis kelima penelitian adalah sebagai berikut.

H5: Ukuran Kabupaten/Kota berpengaruh positif terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah.

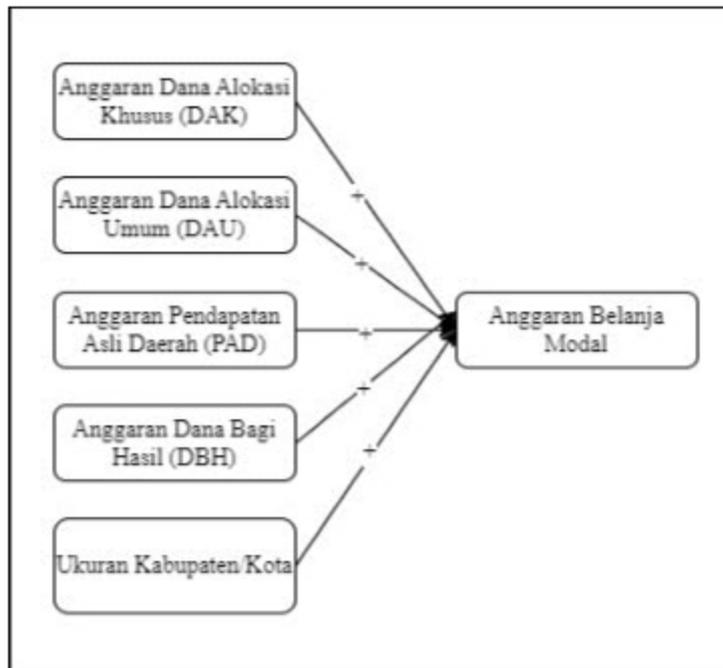
### II.3 Kerangka Penelitian

Dari penelitian terdahulu dapat terlihat bahwa fokus penelitian pada belanja modal terletak pada realisasi belanja modal pemerintah sebagai variabel dependen. Istilah realisasi adalah capaian aktual dari sebuah anggaran atau dengan sebutan lain target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam analogi teori keagenan, konflik kepentingan antara manajemen dengan pemilik perusahaan dimulai tidak hanya saat manajemen merealisasikan target atau anggaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, akan tetapi dimulai sejak pembentukan anggaran atau target itu dibuat untuk disepakati oleh operator perusahaan dengan pemilik.

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa peran pengawasan dan *bonding activities* untuk menurunkan *agency cost* yang dihadapi oleh pemilik perusahaan dari perilaku manajemen mencakup beberapa metode yaitu audit, *budget restrictions*, dan sistem kompensasi kepada manajemen. Dalam artikelnya Jensen & Meckling (1976) sangat jelas mekanisme *budget restrictions* adalah salah satu cara mengawasi dan mengendalikan perilaku manajemen agar mereka bertindak sesuai dengan kepentingan para pemilik. Proses penganggaran sesuai penjelasan teori di atas telah menimbulkan konflik antara manajemen sebagai operator perusahaan dengan pihak pemilik. Manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan dirinya (*self interest*) (Eisendhart, 1989). Dari dua penjelasan teori tersebut di atas dapat ditarik logika berpikir bahwa para manajemen perusahaan akan bertindak sesuai dengan kepentingan dirinya sehingga menimbulkan kemungkinan besar konflik kepentingan dengan para pemilik perusahaan termasuk dalam hal penganggaran belanja modal dalam sektor publik.

Uraian di atas menambahkan referensi melalui penelitian sekarang terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dengan penambahan penjelasan hubungan keagenan dalam tahap penganggaran belanja modal. Tahap penganggaran belanja modal adalah fase yang terjadi sebelum fase realisasi dengan berbagai faktor penentu pada fase tersebut. Tahap realisasi belanja modal sebagai variabel terikat sudah ter jelaskan dalam penelitian terdahulu dipengaruhi oleh berbagai variabel bebas. Penelitian ini menjelaskan beberapa variabel independen dalam dimensi realisasi belanja modal berupa DAK, DAU, PAD, dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk diuji pada dimensi penganggaran belanja modal. Alasan dari empat variabel bebas tersebut diuji pada fase penganggaran belanja modal adalah kemampuan variabel DAK, DAU, PAD dan DBH untuk diukur pada tahap penganggaran belanja modal. Selain itu, keempat variabel bebas tersebut adalah beberapa bagian yang diajukan oleh manajemen atau legislatif dalam format RAPBD kepada para pemilik dalam hal ini adalah DPRD sebagai wakil rakyat untuk disepakati dan disetujui bersama.

Berikut bagan skema penelitian sekarang yang merupakan pengembangan dari teori keagenan dalam konteks penganggaran belanja modal di sektor publik dengan mengambil kombinasi variabel bebas dari beberapa penelitian terdahulu untuk mendapatkan syarat kebaruan *novelty* dalam tema penelitian determinan penganggaran belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.



**Gambar 2. 1 Skema Arah Penelitian Sekarang**

Dari penjelasan beberapa faktor yang memengaruhi Anggaran atau Realisasi Belanja Modal di atas, masih terdapat beberapa faktor yang bersumber dari penelitian terdahulu seperti kemandirian daerah yang dilambangkan dengan perhitungan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah (Halim, 2002). Kemandirian daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap porsi belanja modal pemerintah daerah (Nurhidayati & Yaya, 2013).

Selanjutnya terdapat faktor efektivitas keuangan daerah yang dihitung berdasarkan rasio realisasi PAD dibandingkan target penerimaan PAD (Nurhidayati & Yaya, 2013). Hasil penelitian Nurhidayati & Yaya (2013) menemukan bahwa efektivitas keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap porsi belanja modal.

Penelitian sebelumnya dari Nurhidayati & Yaya (2013) menemukan hubungan positif antara variabel efisiensi keuangan daerah terhadap porsi belanja modal. Belum ada penelitian lain yang menggunakan variabel bebas ini selain dari penelitian Nurhidayati & Yaya (2013) sejauh peneliti sekarang menggali informasi dari literatur terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu dengan hasil yang berarah positif dalam memengaruhi belanja modal adalah variabel PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Luas Wilayah Daerah, karakteristik Pemerintah Daerah. Hasil penelitian dari Mutiah & Mappanyuki (2015) menyatakan bahwa karakteristik Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap keputusan belanja modal.

Beberapa penelitian terdahulu yang tidak konsisten menyatakan hubungan antara faktor yang memengaruhi Belanja Modal adalah variabel SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)

dimana hasil penelitian terdahulu menemukan hubungan negatif dan positif terhadap Belanja Modal. Sugiardi & Supadmi (2014) menemukan hubungan yang positif dan signifikan SiLPA terhadap Belanja Modal. Hasil sebaliknya dari Nurhidayati & Yaya (2013) menjelaskan hubungan negatif SiLPA terhadap porsi belanja modal.

Variabel bebas yang memengaruhi secara negatif terhadap belanja modal adalah Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian dari Nurzen & Riharjo (2016) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berhubungan negatif terhadap belanja modal. Secara definisi berarti proses kenaikan kapasitas pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan PDRB atau PDB sebuah negara pada periode tertentu (Nurzen & Riharjo, 2016).

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian ini dan bersumber dari obyek penelitian di luar negara Indonesia seperti *Change in Accounting Standards* berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Variabel *Implemented Accrual Accounting in Municipalities* oleh Christofzik (2019) menemukan hasil negatif signifikan terhadap belanja modal. Bacchiocchi et al., (2011) menemukan bahwa variabel independen *debt sustainability* yang diukur dengan total hutang pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal pemerintah dan belanja modal bidang pendidikan dengan menggunakan sampel negara-negara OECD dan Uni Eropa. Variabel lain berupa *external environment* yang diproksikan dengan *municipal size, tax base, tax rate* dan *fee level* oleh Haraldsson (2022) memengaruhi deviasi belanja modal *municipal* khususnya sektor pengairan dan saluran pembuangan di negara Swedia.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### III.1 Populasi dan Sampel

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif. Pemilihan sampel dari populasi yang diambil menggunakan metode *purposive sampling*. Populasi dari penelitian ini adalah semua kabupaten dan atau kota di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan Provinsi Jawa Tengah sebagai populasi penelitian karena dari ketiga provinsi di Republik Indonesia yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak yaitu Jawa Timur (29 kabupaten dan 9 kota), Jawa Tengah (29 kabupaten dan 6 kota), dan Sumatera Utara (25 kabupaten dan 8 kota), Provinsi Jawa Tengah yang memenuhi kriteria pengambilan sampel. Adapun kriteria sampel yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Sampel didasarkan pada satu periode jabatan aktif Kepala Daerah baik Bupati maupun Walikota (selama 5 tahun dalam satu periode jabatan) untuk mengurangi disparitas atau deviasi Kepala Daerah yang dimungkinkan akan terjadi pergantian jika penelitian dilakukan lebih dari satu periode masa aktif jabatan, dan
2. Sampel didasarkan pada periode sebelum terjadinya pandemi Covid-19 yang mulai masuk ke wilayah Indonesia pada awal tahun 2020. Hal ini bertujuan untuk mengurangi bias pengaruh penyusunan anggaran belanja modal di Pemerintah Daerah karena saat terjadi pandemi, fokus Pemerintah Indonesia tanpa terkecuali Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Indonesia adalah menanggulangi dampak bencana pandemi Covid-19, dan
3. Periode pengambilan sampel untuk memenuhi dua kriteria sebelumnya adalah 2015-2019.

Dari ketiga kriteria pengambilan sampel di atas, Provinsi Jawa Tengah mendapatkan jumlah sampel terbanyak sebesar 70 data panel. Hasil tersebut dapat digunakan untuk proses regresi secara statistik karena memenuhi syarat minimal jumlah sampel sesuai kaidah statistik dalam penelitian. Berikut tabel hasil pengambilan sampel di Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 3. 1 Hasil Pengambilan Sampel *Purposive***

No	Nama Kabupaten/Kota	Nama Kepala Daerah	Periode Jabatan
1	Kabupaten Blora	Djoko Nugroho	2015-2019
2	Kabupaten Boyolali	Seno Samodro	
3	Kabupaten Grobogan	Sri Sumarni	
4	Kabupaten Kendal	Mirna Annisa	
5	Kabupaten Pemalang	H. Junaedi	
6	Kabupaten Purworejo	Agus Bastian	
7	Kabupaten Rembang	H. Abdul Hafidz	
8	Kabupaten Semarang	Mundjirin	
9	Kabupaten Sukoharjo	Wardoyo Wijaya	
10	Kabupaten Wonogiri	Joko Sutopo	
11	Kabupaten Wonosobo	Eko Purnomo	
12	Kota Magelang	H. Sigit Widyonindito	
13	Kota Semarang	Hendrar Prihadi	
14	Kota Surakarta	FX. Hadi Rudyatmo	

Sumber: Data diolah

Data yang diperlukan adalah data sekunder yang berasal dari satu dataset LKPD dan data jumlah penduduk dari BPS dan atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masing-masing wilayah kabupaten dan kota sesuai sampel di atas dengan periode penelitian 2015-2019. Jenis data penelitian adalah data panel longitudinal dengan jenis distribusi data tidak normal.

### **III.2 Definisi Variabel Penelitian**

#### **III.2.1 Variabel Dependen (Y)**

Anggaran Belanja Modal atau yang disingkat menjadi (ABM) dalam model penelitian didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Variabel Dependen (Y) dalam penelitian ini adalah Anggaran Belanja Modal (ABM). Anggaran Belanja Modal (ABM) diukur menggunakan angka anggaran belanja modal dalam RAPBD Kabupaten/Kota sesuai sampel penelitian. Belanja modal untuk pelayanan publik

adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset) yang ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana publik yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat (Nurhidayati & Yaya, 2013).

### **III.2.2 Variabel Independen (X)**

Variabel eksogen (X) merupakan variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan variabel endogen (Y) serta sifatnya yang berdiri sendiri (tidak dipengaruhi oleh variabel lain) (Sugiyono, 2011). Variabel independen atau eksogen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **a. Variabel DAK (Dana Alokasi Khusus)/ X1**

Variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengukuran variabel independen DAK menggunakan angka anggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada sampel penelitian. Kebijakan DAK secara spesifik ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)) adalah untuk membantu daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah (Nurhidayati & Yaya, 2013). Dana Alokasi Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

#### **b. Variabel DAU (Dana Alokasi Umum)/X2**

Variabel independen kedua dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Pengukuran variabel independen DAU menggunakan angka anggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada sampel penelitian. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Wandira, 2013). Dana Alokasi Umum didefinisikan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

#### **c. Variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah)/X3**

Variabel independen ketiga dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengukuran variabel independen PAD menggunakan angka anggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada sampel penelitian. Pendapatan Asli Daerah

didefinisikan sebagai pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber murni daerah (Nurhidayati & Yaya, 2013). PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah yang didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Wandira, 2013).

d. Variabel DBH (Dana Bagi Hasil)/X4

Variabel independen keempat dalam penelitian ini adalah Dana Bagi Hasil (DBH). Pengukuran variabel independen DBH menggunakan angka anggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada sampel penelitian. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Heliyanto & Handayani, 2016). Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah DBH didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

e. Variabel Ukuran Kabupaten/Kota (*Size*)/X5

Variabel independen kelima dalam penelitian ini adalah Ukuran Kabupaten/Kota. Pengukuran variabel independen Ukuran Kabupaten/Kota ini menggunakan angka jumlah populasi penduduk (jumlah penduduk) suatu Kabupaten/Kota sesuai sampel penelitian. Data jumlah populasi penduduk didapatkan dari sumber Badan Pusat Statistik dan atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota sesuai sampel penelitian. Jumlah Populasi adalah salah satu faktor penting yang digunakan dalam beberapa penelitian sektor publik terdahulu (Collin et al., 2017). Ukuran kabupaten/kota berdasarkan jumlah populasi telah banyak digunakan dalam beberapa penelitian sebelumnya daripada ukuran organisasi pemerintahan daerah seperti rasio laporan keuangan pemda atau ukuran aset (Collin et al., 2017). Populasi dalam sebuah kabupaten/kota terdiri dari pemegang hak suara pemilu, pembayar pajak dan pengguna fasilitas umum sehingga politisi memandang mereka adalah bagian terpenting pemangku kepentingan dalam belanja modal (Haraldsson, 2022).

### III.3 Model Penelitian

Berdasarkan penjelasan variabel dependen dan independen yang digunakan dalam penelitian di atas, maka bentuk model penelitian untuk diterapkan adalah sebagai berikut.

$$ABM = \alpha + \beta_{DAK} + \beta_{DAU} + \beta_{PAD} + \beta_{DBH} + \beta_{Ukuran} + \varepsilon$$

Keterangan:

ABM	= Anggaran Belanja Modal
$\alpha$	= Konstanta
DAK	= Anggaran Dana Alokasi Khusus
DAU	= Anggaran Dana Alokasi Umum
PAD	= Anggaran Pendapatan Asli Daerah
DBH	= Anggaran Dana Bagi Hasil
Ukuran	= Ukuran Kabupaten/Kota ( <i>Population</i> )
$\varepsilon$	= <i>error</i>

### III.4 Metode Analisa

#### III.4.1 Jenis Penelitian dan Regresi

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Regresi yang digunakan dalam analisa penelitian adalah regresi linier berganda data panel. Data panel adalah data yang bersifat *time series* dan *cross section* sehingga terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode (Winarno, 2017). Data panel memiliki beberapa keunggulan, seperti informasi yang didapatkan menjadi lebih banyak, kolinearitas yang lebih sedikit dan tepat digunakan untuk dinamika perubahan (Gujarati, 2004). Uji asumsi klasik tidak selalu diperlukan dalam analisis data panel karena data panel dapat meminimalkan bias yang kemungkinan besar muncul dalam hasil analisis, memberi lebih banyak informasi, variasi, dan *degree of freedom* (Gujarati & Porter, 2012). Pada regresi data panel, tidak semua uji asumsi klasik yang ada pada metode OLS dipakai, hanya multikolinieritas dan heteroskedastisitas saja yang diperlukan (Tri Basuki & Prawoto, 2015).

Gujarati (2004) menyatakan meskipun data panel memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan data *time series* dan *cross section*, data panel dapat menimbulkan beberapa masalah diantaranya heteroskedastisitas (*data cross section*) dan autokorelasi (*data time series*). Oleh karena itu, dalam menangani masalah tersebut maka estimasi model regresi data panel menggunakan teknik *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)* (Pebriyanti, 2015). *Software* analisa statistik yang digunakan untuk mengestimasi hubungan antar variabel pada model penelitian serta uji hipotesis adalah *Eviews* seri 12.

### **III.4.2 Teknik Estimasi Model Regresi Data Panel**

Dalam regresi data panel terdapat tiga teknik estimasi yang ditawarkan yaitu: *Pool OLS (Common Effect)*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* (Pebriyanti, 2015). Ketiga teknik estimasi model regresi data panel tersebut dijelaskan sebagai berikut.

#### **III.4.2.1 Common Effect Model (CEM)/ Pool Ordinary Least Square (Pool OLS)**

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini dapat menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)* atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel (Renita, 2019).

#### **III.4.2.2 Fixed Effect Model (FEM)**

*Fixed Effect Model* merupakan pendekatan yang mengasumsikan bahwa data secara individu memiliki intersep yang bervariasi antar individu data lainnya. Konstanta yang tetap besarnya untuk seluruh periode dalam satu objek ini lah yang disebut sebagai efek tetap. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable (LSDV)* (Widarjono, 2013).

#### **III.4.2.3 Random Effect Model (REM)**

Metode *Random Effects* adalah model yang digunakan untuk mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Dalam menjelaskan *random effects* tersebut diasumsikan setiap data memiliki perbedaan intersep. Model ini sangat berguna jika data secara individu yang kita ambil sebagai sampel dipilih secara *random* dan merupakan wakil dari populasi (Renita, 2019).

#### **III.4.2.4 Pemilihan Model Regresi Data Panel**

Langkah selanjutnya adalah memilih model yang paling tepat dari ketiga estimasi model regresi data panel yang telah diuraikan sebelumnya (Renita, 2019). Secara formal terdapat dua macam pengujian yang dapat digunakan, yaitu Uji Chow dan Uji Hausman (Renita, 2019).

##### **III.4.2.4.1 Uji Chow**

Uji Chow berguna untuk mengetahui apakah model FEM (*Fixed Effect Model*) lebih baik dibandingkan model CEM (*Common Effect Model*) dapat dilakukan dengan melihat signifikansi nilai F-statistik model FEM (Renita, 2019). Kriteria penilaian uji Chow adalah perhitungan dari hasil regresi data yang menunjukkan baik F-test maupun Chi-square (Widarjono, 2013). Menurut Renita (2019) dengan membandingkan hasil dari F-hitung dengan F-tabel maka didapatkan hipotesis sebagai berikut.

$H_0$  :  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , artinya model mengikuti CEM

$H_A$ :  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , artinya model mengikuti FEM

Sedangkan, Chi-square dilihat dari nilai probabilitas, jika nilai probabilitas (*p-value*) lebih kecil dari tingkat signifikansi  $\alpha \leq 5\%$  maka  $H_0$  tidak didukung, artinya model panel yang lebih baik untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model*, dan sebaliknya, jika  $H_0$  didukung, berarti model yang digunakan adalah model *Pooled Least Square (Common Effect Model)*. Namun jika  $H_0$  ditolak, maka model *Fixed Effect Model* harus diuji kembali untuk memilih apakah akan memakai model *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*, baru kemudian dianalisa lebih lanjut (Renita, 2019).

#### III.4.2.4.2 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui apakah model *fixed effect* lebih baik dari model *random effect*. Kriteria penilaian Uji Hausman adalah jika muncul hasil yang menunjukkan baik F-test maupun Chi-square jika *p-value*  $> 5\%$  maka  $H_0$  diterima dan jika *p-value*  $< 5\%$  maka  $H_0$  ditolak (Widarjono, 2013). Jika hasil dari *Hausman Test* signifikan, maka  $H_0$  tidak didukung, sehingga yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

#### III.4.2.4.3 Uji Asumsi Klasik Data Panel

Metode estimasi model panel pengaruh acak (*random effect*) menggunakan metode *generalized least square (GLS)*, sedangkan model panel pengaruh gabungan (*common effect*) dan model panel pengaruh tetap (*fixed effect*) menggunakan *ordinary least square (OLS)* (Gujarati & Porter, 2012). Salah satu kelebihan metode GLS yaitu tidak perlu memenuhi asumsi klasik (Kosmaryati et al., 2019). Apabila model regresi menggunakan *random effect* maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik (Kosmaryati et al., 2019). Sebaliknya, apabila digunakan model regresi *common effect* atau *fixed effect* maka perlu dilakukan uji asumsi klasik (Kosmaryati et al., 2019).

### III.4.3 Uji Hipotesis

#### III.4.3.1 Uji F-Stat

Pengujian signifikansi koefisien regresi dapat menggunakan uji hipotesis (Nachrowi & Usman, 2006). Terdapat dua uji hipotesis digunakan untuk menguji koefisien regresi yaitu, uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t) (Kosmaryati et al., 2019). Uji F ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang diestimasi dapat dikatakan layak atau tidak (Kosmaryati et al., 2019). Penentuan layak atau tidaknya model regresi yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel (Kosmaryati et al., 2019).

### III.4.3.2 Uji t-stat

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (seberapa besar variabel dependen dapat diterangkan oleh variabel independen secara individual) (Kosmaryati et al., 2019). Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Widarjono, 2013).

### III.4.3.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran untuk menghitung seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen (Kosmaryati et al., 2019). Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 1 (Ghozali, 2011). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2011).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model (Ghozali, 2011). Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik (Ghozali, 2011). Tidak seperti  $R^2$ , nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2011).

## **BAB IV**

### **ANALISIS dan PEMBAHASAN**

Bab ini membahas analisis dari model penelitian yang telah diuji secara statistik baik berupa uji model terbaik menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman karena penggunaan data panel pada sampel penelitian, Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis. Populasi dari penelitian kuantitatif ini adalah seluruh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Data yang digunakan untuk sampel penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari LKPD Pemda Kabupaten/Kota sampel penelitian dan data jumlah populasi/penduduk Kabupaten atau Kota dari Badan Pusat Statistik dan atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang menjadi sampel penelitian.

Data panel sampel penelitian diambil dari tahun 2015 – 2019. Variabel independen penelitian ini berjumlah lima dengan rincian secara berurutan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai X1, anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai X2, anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai X3, anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai X4 dan Ukuran Kabupaten/Kota sebagai X5. Sedangkan, variabel dependen dalam penelitian (Y) adalah anggaran Belanja Modal.

Penelitian ini bersifat kuantitatif untuk menguji determinan anggaran belanja modal daerah. Penelitian menguji pengaruh variabel independen anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), anggaran Dana Alokasi Umum (DAU), anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) serta Ukuran Kabupaten/Kota terhadap Anggaran Belanja Modal Daerah (ABM) sebagai variabel dependen. Penelitian ini menguji pengaruh positif atau negatif begitu juga signifikansi dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

#### **IV.1 Statistik Deskriptif**

Tahapan awal analisa dalam penelitian ini yaitu melakukan analisis deskriptif untuk mengetahui gambaran umum sampel penelitian (Kosmaryati et al., 2019). Data yang diolah dalam statistik deskriptif ini menunjukkan angka dalam jutaan terkecuali angka jumlah populasi penduduk (X5) yang dinyatakan dalam nominal penuh. Sampel penelitian disajikan dalam lampiran penelitian ini. Berikut tabel 4.1 yang menyajikan statistik deskriptif variabel dalam penelitian yang menggambarkan sampel penelitian secara umum.

**Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif**

Keterangan	Variabel					
	Dependen	Independen				
	Y	X1	X2	X3	X4	X5
	ABM	DAK	DAU	PAD	DBH	Ukuran Kabupaten/Kota
Mean	508.781,0	258.493,3	929.152,1	382.869,9	57.943,1	916.907,3
Median	418.198,6	303.326,0	941.142,7	277.191,9	43.939,74	920.464,5
Maximum	3.749.437,0	497.012,2	1.288.424,0	2.128.176,0	209.937,3	1.689.655,0
Minimum	188.977,0	3.750,1	415.469,4	137.375,0	24.457,72	120.995,0

Sumber: Data olahan dalam jutaan

Dari informasi dalam tabel 4.1 di atas terlihat variabel dependen Y berupa Anggaran Belanja Modal memiliki rata-rata sebesar Rp508.781.000.000,- untuk semua sampel pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Median atau nilai tengah dari variabel Anggaran Belanja Modal ini sebesar Rp418.198.600.000,-. Nominal terbesar dari sampel Anggaran Belanja Modal mencapai Rp3.749.437.000.000,- terdapat pada Kota Semarang tahun 2019. Sedangkan, nominal terendah Anggaran Belanja Modal pada sampel penelitian sebesar Rp188.977.000.000,- terdapat di Kota Magelang tahun 2015.

Informasi lebih lanjut dari variabel X1 berupa Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) secara rata-rata di semua sampel sebesar Rp258.493.300.000,-. Nilai tengah dari Anggaran DAK sebesar Rp303.326.000.000,-. Nominal terbesar Anggaran DAK dalam sampel penelitian berada di Kabupaten Semarang tahun 2016 sebesar Rp497.012.160.000,-. Nilai terendah Anggaran DAK sebesar Rp3.750.100.000,- terdapat di Kota Surakarta pada tahun 2015.

Variabel X2 berupa Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) secara rata-rata bernilai Rp929.152.100.000,-. Anggaran DAU dalam sampel penelitian ini memiliki nilai tengah sebesar Rp941.142.700.000,-. Nilai terbesar Anggaran DAU terdapat di Kota Semarang tahun 2019 sebesar Rp1.288.423.920.000,-. Kota Magelang memiliki Anggaran DAK terkecil dalam sampel penelitian sebesar Rp415.469.410.000,- pada tahun 2016.

Variabel X3 berupa Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sampel penelitian sebesar Rp382.869.900.000,-. Nilai tengah Anggaran PAD sampel penelitian sebesar Rp277.191.900.000,-. Kota Semarang memiliki Anggaran PAD terbesar dalam sampel penelitian pada tahun 2019 mencapai Rp2.128.176.140.000,-. Kabupaten Blora menjadi

kabupaten terkecil dalam sampel penelitian karena hanya memiliki Anggaran PAD sebesar Rp137.375.000.000,- pada tahun 2015.

Variabel X4 berupa Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) rata-rata sampel penelitian sebesar Rp57.943.100.000,-. Nilai tengah Anggaran DBH sebesar Rp43.939.740.000,-. Anggaran DBH terbesar terdapat di Kota Semarang mencapai Rp209.937.300.000,- pada tahun 2017. Anggaran DBH terendah terdapat di Kota Magelang hanya sebesar Rp24.457.720.000,- tahun 2015.

Variabel X5 dengan *proxy* jumlah populasi penduduk Kabupaten/Kota sampel penelitian secara rata-rata mencapai 916.907 jiwa. Nilai tengah dari jumlah penduduk ini sebesar 920.464 jiwa. Jumlah penduduk terbesar dalam sampel penelitian mencapai 1.689.655 jiwa berada di Kota Semarang pada tahun 2019. Sedangkan, jumlah penduduk terendah dalam sampel penelitian ada di Kota Magelang tahun 2015 yang hanya sebesar 120.995 jiwa.

## **IV.2 Estimasi Model Regresi Data Panel**

Terdapat tiga metode pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu model gabungan, model pengaruh tetap, dan model pengaruh acak (Basuki & Yuliadi, 2014). Model panel pengaruh gabungan (*common effect*), model panel pengaruh tetap (*fixed effect*), dan model panel pengaruh acak (*random effect*) (Kosmaryati et al., 2019). Langkah selanjutnya adalah memilih model yang paling tepat dari ketiga estimasi model regresi data panel yang telah diuraikan sebelumnya (Renita, 2019). Secara formal terdapat dua macam pengujian yang dapat digunakan, yaitu Uji Chow dan Uji Hausman (Renita, 2019).

### **IV.2.1 Uji Chow**

Menurut Renita (2019) Uji Chow berguna untuk mengetahui apakah model FEM (*Fixed Effect Model*) lebih baik dibandingkan model CEM (*Common Effect Model*) dengan cara melihat signifikansi nilai F-statistik. Berikut hasil Uji Chow dengan *software* Eviews 12.

**Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow**

Effects Tests	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.122911	(13,51)	0.0018
Cross-section Chi-square	40.990751	13	0.0001

Sumber: Data olahan

Hipotesis awal ( $H_0$ ) pada uji Chow adalah tidak terdapat pengaruh individu terhadap model (model mengikuti model gabungan) dan hipotesis tandingannya ( $H_1$ ) adalah terdapat satu atau lebih pengaruh individu terhadap model (model mengikuti model pengaruh tetap) (Kosmaryati et al., 2019). Keputusan tolak  $H_0$  jika  $F_0 > F_{N-1, N(T-1)-K}$  atau jika nilai  $p < \alpha$  (Kosmaryati et al., 2019). Hasil Uji Chow di atas berarti nilai F-stat Cross-section adalah 0,0018 dimana  $p < 0,05$  dengan  $\alpha = 5\%$ . Kesimpulan pada Uji Chow ini adalah model estimasi regresi data panel menggunakan model pengaruh tetap (*fixed effect model*).

#### IV.2.2 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menguji signifikansi antara model pengaruh acak dengan model pengaruh tetap (Kosmaryati et al., 2019). Hipotesis awal ( $H_0$ ) yang digunakan pada uji ini adalah model mengikuti model pengaruh acak dan hipotesis tandingannya ( $H_1$ ) adalah model mengikuti model pengaruh tetap (Kosmaryati et al., 2019). Setelah dilakukan Uji Chow dan didapatkan hasil bahwa *Fixed Effect* merupakan model yang sesuai dengan penelitian, maka tahap selanjutnya adalah melakukan *Random Effect Model* untuk kemudian dibandingkan manakah estimasi yang paling tepat diantara FEM dan REM pada uji Hausman (Renita, 2019). Keputusan tolak  $H_0$  jika nilai  $p < \alpha$  (Kosmaryati et al., 2019). Berikut hasil *Hausman Test* dengan Eviews 12.

**Tabel 4. 3 Hasil Hausman Test**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	32.912432	5	0.0000

Sumber: Olahan data

Hasil dari Uji Hausman di atas terlihat nilai probabilitas atau *p-value* adalah  $0,0000 < 0,05$  ( $\alpha$ ). Kesimpulan dari hasil *Hausman Test* di atas adalah  $H_0$  tidak didukung yang berarti model mengikuti model pengaruh tetap (*fixed effect model*).

Dari hasil kedua uji estimasi model regresi data panel di atas, maka *Fixed Effect Model* (FEM) mendapatkan hasil dua kali pemilihan baik dalam Uji Chow dan Uji Hausman. Setelah melakukan penentuan model menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman yang sama-sama menunjukkan hasil bahwa *Fixed Effect Model* (FEM), maka langkah selanjutnya melakukan uji asumsi klasik pada model regresi data panel FEM.

Metode estimasi model panel pengaruh acak (*random effect*) menggunakan metode *generalized least square* (GLS), sedangkan model panel pengaruh gabungan (*common effect*) dan model panel pengaruh tetap (*fixed effect*) menggunakan *ordinary least square* (OLS) (Gujarati & Porter, 2012). Apabila model regresi menggunakan *random effect* maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik (Kosmaryati et al., 2019). Sebaliknya, apabila digunakan model regresi *common effect* atau *fixed effect* maka perlu dilakukan uji asumsi klasik (Kosmaryati et al., 2019).

### IV.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik tetap dilakukan pada regresi data panel jika model regresi terpilih sesuai Uji Chow dan Uji Hausman adalah regresi selain model *random effect*. Data panel memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan data *time series* dan *cross section*, namun data panel dapat menimbulkan beberapa masalah diantaranya heteroskedastisitas (*data cross section*) dan autokorelasi (*data time series*) (Gujarati, 2004). Apabila model regresi menggunakan *random effect* maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik (Kosmaryati et al., 2019). Sebaliknya, apabila digunakan model regresi *common effect* atau *fixed effect* maka perlu dilakukan uji asumsi klasik (Kosmaryati et al., 2019). Pada regresi data panel, tidak semua uji asumsi klasik yang ada pada metode OLS dipakai, hanya multikolinieritas dan heteroskedastisitas saja yang diperlukan (Tri Basuki & Prawoto, 2015). Pada regresi data panel,

tidak semua uji asumsi klasik yang ada pada metode OLS dipakai, hanya multikolinieritas dan heteroskedastisitas saja yang diperlukan (Widarjono, 2013).

Uji asumsi klasik tidak secara keseluruhan harus dilakukan pada setiap model dan masing-masing pendekatan yang berbeda (Ningrum et al., 2020). Uji asumsi klasik tidak selalu diperlukan dalam analisis data panel karena data panel dapat meminimalkan bias yang kemungkinan besar muncul dalam hasil analisis, memberi lebih banyak informasi, variasi, dan *degree of freedom* (Gujarati & Porter, 2012). Uji linieritas dan autokorelasi tidak digunakan dalam kedua pendekatan yang ada baik dari OLS maupun GLS (Siburian & Aptanta Henanda Sari, 2022). Uji Autokorelasi tidak diharuskan juga digunakan karena uji ini hanya terjadi pada data *time series* dan tidak terdapat pada data *cross-section* maupun data panel (Siburian & Aptanta Henanda Sari, 2022).

Uji normalitas tidak wajib pada pendekatan OLS, sementara wajib untuk pendekatan GLS (Kuncoro, 2013). Metode estimasi model panel pengaruh acak (*random effect*) menggunakan metode *generalized least square (GLS)*, sedangkan model panel pengaruh gabungan (*common effect*) dan model panel pengaruh tetap (*fixed effect*) menggunakan *ordinary least square (OLS)* (Gujarati & Porter, 2012). Oleh karena estimasi terbaik yang dipilih dalam penelitian ini adalah *fixed effect model* (model pengaruh tetap), maka penggunaan metode FEM menggunakan pendekatan OLS. Ketentuan regresi linier berganda dengan pendekatan OLS adalah harus lolos uji asumsi klasik dan uji asumsi klasik yang digunakan pada estimasi FEM (*Fixed Effect Model*) adalah Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskedastisitas (Mardani, 2019).

#### **IV.3.1 Uji Multikolinieritas**

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*) (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2011). Kelompok data variabel eksogen tidak boleh berkorelasi sangat kuat  $r > 0.90$  (Napitupulu et al., 2021). Jika terjadi demikian maka terjadi masalah multikolinieritas (Napitupulu et al., 2021). Syarat tidak terjadinya suatu model regresi berganda data panel adalah nilai korelasi antar variabel independen tidak boleh lebih dari 0,9 atau  $r > 0.9$ . Berikut hasil Uji Multikolinieritas penelitian ini.

**Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas**

	X1	X2	X3	X4	X5
X1	1.000000	0.549153	0.000181	0.003574	0.381177
X2	0.549153	1.000000	0.382808	0.313198	0.870521
X3	0.000181	0.38281	1.000000	0.790474	0.542304
X4	0.003574	0.3132	0.790474	1.000000	0.484207
X5	0.381177	0.87052	0.542304	0.484207	1.000000

Sumber: Data diolah

Dari hasil data di atas, semua variabel independen (eksogen) tidak ada nilai  $r > 0.90$  yang berarti tidak terjadi multikolinearitas. Seluruh hubungan bivariate antar variabel eksogen lebih kecil dari 0.9000 ( $r < 0.9000$ ) (Napitupulu et al., 2021). Dalam model tidak terdapat masalah multikolinearitas (Napitupulu et al., 2021).

#### IV.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas salah satu cara untuk melihatnya adalah dengan melakukan Uji Glejser (Renita, 2019). Uji Glejser menggunakan absolut residual sebagai variabel dependennya (Renita, 2019). Berikut hasil estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) sebagai pilihan terbaik dalam mengestimasi pengaruh variabel independen terhadap dependen dalam penelitian ini untuk diuji menggunakan Uji Glejser.

**Tabel 4. 5 Hasil Estimasi *Fixed Effect Model***

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2381718.0	1447753.0	1.645114	0.1061
X1	0.430667	0.290655	1.481715	0.1446
X2	-0.734887	0.649631	-1.131238	0.2632
X3	2.377775	0.328802	7.231641	0.0000
X4	-11.845250	2.467976	-4.799579	0.0000
X5	-1.663711	1.465018	-1.135625	0.2614

Sumber: Olahan data

Kemudian dilakukan Uji Glejser sebagai syarat uji asumsi klasik heteroskedastisitas agar model regresi dikatakan baik dalam mengestimasi hubungan variabel independen terhadap dependen. Berikut hasil Uji Glejser.

**Tabel 4. 6 Hasil Uji Glejser**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-596753.5	566386.6	-1.053615	0.2970
X1	-0.276326	0.113709	-2.430108	0.0187
X2	0.113910	0.254147	0.448205	0.6559
X3	0.543698	0.128633	4.226740	0.0001
X4	0.632218	0.965516	0.654798	0.5155
X5	0.456326	0.573141	0.796185	0.4296

Sumber: Data olahan

Dari hasil Uji Glejser di atas, dapat disimpulkan terjadi gejala heteroskedastisitas pada variabel independen Anggaran Dana Alokasi Khusus (X1) dan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (X3). Jika  $\alpha$  variabel bebas  $> 0.05$  berarti tidak terjadi heteroskedastisitas (Napitupulu et al., 2021). Nilai probabilitas dari X1 dan X3  $p < 0,05$  berarti bahwa variabel X1 dan X3 mengalami gejala heteroskedastisitas. Berarti pada variabel ini terjadi heteroskedastisitas (Napitupulu et al., 2021). Pada model *common effect* atau *fixed effect*, implikasi terjadi autokorelasi dan heteroskedastisitas pada data panel dapat diperbaiki dengan berbagai macam cara, salah satu dengan mengubah kebentuk model *cross-section weights* atau *cross-section SUR* (Napitupulu et al., 2021).

#### IV.4 Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis dilakukan untuk mengetahui hipotesis yang telah ditetapkan diterima atau ditolak secara statistik (Renita, 2019). Secara statistik, setidaknya ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodnes of Fit*-nya (Ghozali, 2011). Dalam statistik, *Goodnes of Fit* diukur dari nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ), nilai statistik F, dan nilai statistik t (Ghozali, 2011).

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji F-statistik, Uji t-statistik dan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ). Berdasarkan Uji Pemilihan Model untuk mengestimasi model terbaik regresi data panel, model terbaik adalah *Fixed Effect Mode (FEM)* dan model tersebut juga sudah lolos uji asumsi klasik setelah diperbaiki akibat terjadi masalah heteroskedastisitas.

Berikut tabel 4.7 yang menunjukkan hasil regresi setelah perbaikan masalah heteroskedastisitas dengan menggunakan pendekatan *fixed effect model* (FEM).

**Tabel 4. 7 Hasil Regresi *Fixed Effect Model***

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1173370.0	700188.2	1.675793	0.0999
X1	0.246805	0.112374	2.196276	0.0326
X2	-0.377258	0.291818	-1.292782	0.2019
X3	1.459031	0.268028	5.443568	0.0000
X4	-6.439741	1.962491	-3.281411	0.0019
X5	-0.614389	0.715515	-0.858666	0.3945

Sumber: Data diolah

Model persamaan regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* yang dapat dibentuk setelah perbaikan heteroskedastisitas berdasarkan tabel di atas adalah sebagai berikut.  

$$Y = 1,173,370.35886 + 0.246805299581X1 - 0.377257629586X2 + 1.45903087771X3 - 6.43974145602X4 - 0.614388854617X5 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y : Anggaran Belanja Modal
- X1 : Anggaran Dana Alokasi Khusus
- X2 : Anggaran Dana Alokasi Umum
- X3 : Anggaran Pendapatan Asli Daerah
- X4 : Anggaran Dana Bagi Hasil
- X5 : Ukuran Kabupaten/Kota
- $\varepsilon$  : *error*

#### IV.4.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), *Adjusted R^2* dan Interpretasinya

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2011). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2011). Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen

yang dimasukkan ke dalam model (Ghozali, 2011). Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik (Ghozali, 2011). Berikut tabel 4.8 yang berisi nilai Koefisien Determinasi model regresi data panel *fixed effect model* (FEM).

**Tabel 4. 8 Koefisien Determinasi**

Weighted Statistics	
R-squared	0.805075
Adjusted R-squared	0.736278

Sumber: Data diolah

Dari hasil regresi diperoleh nilai  $R^2$  adalah 0,805 atau 80,5%. Sedangkan, *Adjusted R<sup>2</sup>* bernilai 0,7362 atau 73,62%. Menurut Ghozali (2011) nilai yang akan kita gunakan adalah *Adjusted R<sup>2</sup>* yaitu 73,62%. Koefisien determinasi adalah besarnya keragaman (informasi) di dalam variabel Y (dependen) yang dapat diberikan oleh model regresi yang didapatkan (Napitupulu et al., 2021). Apabila nilai  $R^2$  dikalikan 100%, maka hal ini menunjukkan persentase keragaman (informasi) di dalam variabel Y yang dapat diberikan oleh model regresi (Napitupulu et al., 2021). Semakin besar nilai  $R^2$ , semakin baik model regresi yang diperoleh (Napitupulu et al., 2021).

Interpretasi dari nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* berdasarkan penjelasan Ghozali (2011) dan Napitupulu et al., (2021) di atas adalah variabel Y (dependen) dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi penelitian sebesar 73,62%. Model penelitian ini dapat mengestimasi pengaruh Anggaran Dana Alokasi Khusus, Anggaran Dana Alokasi Umum, Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Dana Bagi Hasil serta Ukuran Kabupaten/Kota terhadap Anggaran Belanja Modal suatu Kabupaten/Kota adalah sebesar 73,62%. Sedangkan, 26,38% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian yang memengaruhi Anggaran Belanja Modal.

#### **IV.4.2 Uji Kelayakan Model (Uji F-Statistik)**

Uji F ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang diestimasi dapat dikatakan layak atau tidak (Kosmaryati et al., 2019). Penentuan layak atau tidaknya model regresi yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel (Kosmaryati et al., 2019).

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas atau eksogen yang dimasukkan ke dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2011).  $H_0$  yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol yang artinya semua variabel independen bukan

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Hipotesis alternatifnya adalah semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Dapat digambarkan secara rumus  $H_0$  dan  $H_A$  dari Uji statistik F ini.

$$H_0: b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

$$H_A: b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Untuk menguji hipotesis di atas, penggunaan kriteria pengambilan keputusan dengan Uji statistik F adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011).

1. *Quick look*: bila nilai F lebih besar daripada 4, maka  $H_0$  ditolak pada  $\alpha$  5% atau dengan kata lain kita menerima  $H_A$ . Artinya adalah semua variabel independen secara serentak dan signifikan memengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Jika nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_A$ .

**Tabel 4. 9 Hasil Uji F-Statistik**

Weighted Statistics	
F-statistic	11.70220

Sumber: Data diolah

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai F-statistik sebesar 11,70220 atau menurut Ghozali (2011) lebih besar dari nilai 4 dengan  $\alpha = 5\%$ . Hal tersebut berarti  $H_A$  didukung dengan kata lain variabel independen dalam model penelitian berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji statistik F di atas, interpretasi hubungan Anggaran Dana Alokasi Khusus, Anggaran Dana Alokasi Umum, Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Dana Bagi Hasil serta Ukuran Kabupaten/Kota secara bersama-sama signifikan memengaruhi Anggaran Belanja Modal di suatu Kabupaten/Kota.

#### **IV.4.3 Uji statistik t dan Interpretasinya**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ( $b_i$ ) sama dengan nol yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Ghozali, 2011).

$$H_0: b_i = 0$$

$$H_A: b_i \neq 0$$

Interpretasi atas kedua hipotesis di atas adalah apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen ( $H_0$ ) dan hipotesis

alternatifnya (HA) berarti variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Adapun kriteria dari uji statistik t (Ghozali, 2016).

1. Jika nilai signifikansi uji  $t > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_A$  ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi uji  $t < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_A$  diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil olah data yang disajikan dalam tabel 4.7 di atas menggunakan Eviews seri 12, regresi data panel telah diperbaiki dengan metode *cross-section weight* karena masalah heteroskedastisitas. *Cross-section weight* dilakukan apabila terjadi heteroskedastisitas (Napitupulu et al., 2021). Penjelasan atau interpretasi dari Uji Statistik t adalah sebagai berikut.

#### IV.4.3.1 Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

**Tabel 4. 10 Hasil Uji t Statistik Variabel X1**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.246805	0.11237	2.196276	0.0326

Sumber: Data diolah

Dari hasil olah data pada tabel 4.10 di atas, nilai signifikansi variabel X1 atau Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) signifikan pada  $\alpha = 5\%$ . Nilai probabilitas  $0,0326 < \alpha = 0,05$  untuk variabel X1. Arah pengaruh variabel X1 adalah positif melihat koefisien regresi data panel dari X1 adalah nilai positif. Interpretasi dari nilai tersebut adalah kita mendukung hipotesis pertama penelitian yang berarti bahwa Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) secara individu memengaruhi secara signifikan dengan arah positif terhadap Anggaran Belanja Modal.

Inferensi dari penjelasan di atas dapat diterjemahkan bahwa setiap kenaikan Rp1 dari Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), maka akan terjadi kenaikan pada Anggaran Belanja Modal suatu daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.173.370.000.000,3. Data hasil olahan di atas telah disederhanakan dalam bentuk nominal jutaan sehingga inferensi di atas bernilai triliun rupiah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mutiah & Mappanyuki (2015) yang menjelaskan bahwa keputusan belanja modal dipengaruhi secara positif oleh variabel Dana Alokasi Khusus (DAK). Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menggunakan variabel dependen Anggaran Belanja Modal, namun variabel independen berupa realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dari Heliyanto & Handayani (2016) yang

menyatakan bahwa Anggaran Belanja Modal dipengaruhi secara positif oleh Dana Alokasi Khusus.

Hipotesis pertama penelitian di atas yang terdukung dengan data mengkonfirmasi teori keagenan yang menjadi landasan teori penelitian ini. Anggaran Dana Alokasi Khusus menjadi determinan Anggaran Belanja Modal dimana Anggaran DAK tersebut diajukan oleh Pemerintah Daerah yang diwakili Kepala Daerah kepada DPR Daerah untuk disetujui dalam APBD. Kepala Daerah menjalankan fungsi agen yang diberikan kewenangan oleh rakyat yang diwakili DPRD Daerah sebagai prinsipal untuk memenuhi kepentingan masyarakat di daerah melalui pengajuan Anggaran DAK dalam APBD.

#### IV.4.3.2 Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

**Tabel 4. 11 Hasil Uji t Statistik Variabel X2**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X2	-0.377258	0.291818	-1.292782	0.2019

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji regresi data panel pada tabel 4.11 di atas, nilai signifikansi variabel X2 berupa Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,2019 yang artinya nilai signifikansi  $> \alpha$  0,05 maupun 0,10. Koefisien regresi bernilai negatif ditandai dengan tanda minus (-) pada hasil di atas.

Inferensi dari angka-angka tersebut di atas adalah kita tidak mendukung hipotesis kedua penelitian yang berarti tidak ada pengaruh secara individual antara variabel Anggaran Dana Alokasi Umum dengan Anggaran Belanja Modal. Namun, jika dilihat dari arah pengaruh berdasarkan nilai koefisien X2 yang negatif, maka pengaruh Anggaran Dana Alokasi Umum berbanding terbalik dengan Anggaran Belanja Modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Solikhah & Wahyudin (2014) yang menyatakan bahwa variabel DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

Hasil pengujian data di atas yang tidak mendukung hipotesis kedua penelitian sesuai dengan teori keagenan. Konflik keagenan yang terjadi dalam hubungan keagenan antara Kepala Daerah sebagai agen terhadap kepentingan masyarakat daerah sebagai prinsipal tampak dari hipotesis yang tidak terdukung tersebut. Anggaran Dana Alokasi Umum tetap diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD kepada wakil rakyat daerah yaitu DPR Daerah, namun penggunaan Dana Alokasi Umum tersebut tidak khusus untuk Belanja Modal yang ditujukan

untuk kepentingan masyarakat daerah. Secara implisit konflik keagenan terjadi dalam masalah penggunaan dana Anggaran DAU yang tidak secara langsung digunakan untuk Belanja Modal daerah dengan tujuan kepentingan masyarakat daerah oleh Pemerintah Daerah.

#### IV.4.3.3 Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**Tabel 4. 12 Hasil Uji t Statistik Variabel X3**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X3	1.459031	0.268028	5.443568	0.0000

Sumber: Data diolah

Hasil uji regresi pada tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel independen X3 sebesar 0,0000 atau nilai signifikansi  $<$  nilai  $\alpha = 0,05$ . Hal tersebut berarti bahwa kita mendukung hipotesis ketiga dalam penelitian. Penjelasan angka tersebut berarti bahwa Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara individual memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Anggaran Belanja Modal.

Koefisien positif sebesar 1,459031 dapat diinferensikan bahwa setiap kenaikan Rp1 Anggaran Pendapatan Asli Daerah di suatu Kabupaten/Kota, maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.173.370.000.001,5 pada Anggaran Belanja Modal daerah tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Heliyanto & Handayani (2016) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Juniawan & Suryantini, 2018; Mufida & Suryono, 2016; Nurzen & Riharjo, 2016; Nuzana & Riharjo, 2016; Pelealu, 2013; Permatasari & Mildawati, 2016; Rizal & Erpita, 2019; Sholikhah & Wahyudin, 2014; Sugiardi & Supadmi, 2014; Tuasikal, 2008). Namun, penelitian tersebut mengambil dimensi realisasi belanja modal dan PAD dan hanya penelitian Heliyanto & Handayani (2016) yang sejenis dengan penelitian ini karena mengambil variabel dependen Anggaran Belanja Modal meskipun variabel independen PAD diukur dalam dimensi realisasinya.

Hipotesis ketiga di atas mendukung teori keagenan dimana Anggaran Pendapatan Asli Daerah diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD untuk disetujui DPR Daerah. Pemerintah Daerah menjalankan fungsinya sebagai pihak yang dipercaya oleh masyarakat daerah untuk menjalankan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

#### IV.4.3.4 Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH)

Tabel 4. 13 Hasil Uji t Statistik Variabel X4

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X4	-6.439741	1.96249	-3.281411	0.0019

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.13 di atas, nilai signifikansi variabel independen X4 berupa Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar  $0,0019 < \text{nilai signifikansi } \alpha = 0,05$ . Hal ini berarti bahwa Anggaran DBH signifikan dalam memengaruhi Anggaran Belanja Modal, akan tetapi dengan arah yang berbanding terbalik karena nilai koefisien hasil regresi yang memiliki tanda minus (-). Penjelasan tersebut berarti kita tidak mendukung hipotesis keempat penelitian ini. Inferensi dari penjelasan angka-angka tersebut adalah Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal dengan arah negatif.

Inferensi hasil Uji Statistik t variabel X4 ini adalah setiap kenaikan Rp1 Anggaran Dana Bagi Hasil justru akan menurunkan Anggaran Belanja Modal suatu Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.173.369.999.993,6. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nuzana & Riharjo (2016) yang menyatakan bahwa variabel DBH memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Arah negatif dari hasil regresi tersebut dikuatkan dengan definisi Dana Bagi Hasil menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan definisi dari undang-undang tersebut, tidak ada yang menyebutkan secara spesifik tujuan penggunaan Dana Bagi Hasil untuk pembangunan atau belanja modal di suatu daerah. Hal ini dapat diartikan tidak semua atau bahkan Dana Bagi Hasil tidak digunakan sama sekali untuk belanja modal bagi suatu pemerintahan daerah pada praktiknya. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh karakteristik DBH yang bersifat *block grant* memberi keleluasaan pada daerah untuk mengalokasikan dana tersebut pada belanja yang bersifat produktif (Sumardjoko & Irwanto, 2015). Menurut Heliyanto & Handayani (2016) Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja

daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pernyataan Heliyanto & Handayani (2016) yang menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil dapat digunakan untuk belanja daerah dan pembangunan yang artinya Dana Bagi Hasil tidak serta merta dialokasikan khusus untuk belanja modal saja, akan tetapi dapat dialokasikan ke belanja daerah lainnya. Beberapa definisi dan pernyataan dari peneliti terdahulu mengisyaratkan arah regresi tidak selalu positif untuk menyatakan hubungan antara Anggaran Dana Bagi Hasil terhadap Anggaran Belanja Modal.

Hal tersebut di atas mengkonfirmasi konflik keagenan yang dijelaskan dalam teori keagenan. Secara implisit konflik terjadi antara Kepala Daerah sebagai agen dengan masyarakat daerah sebagai prinsipal. Konflik terjadi karena penggunaan dana Anggaran Dana Bagi Hasil yang diajukan oleh pemerintah daerah dalam APBD yang seharusnya digunakan untuk belanja modal pembangunan seperti infrastruktur jalan, pembangunan sekolah dan bentuk pembangunan lain tidak dibelanjakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah sebagai prinsipal daerah.

#### IV.4.3.5 Ukuran Kabupaten/Kota

**Tabel 4. 14 Hasil Uji t Statistik Variabel X5**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X5	-0.614389	0.71552	-0.858666	0.3945

Sumber: Data diolah

Tabel 4.14 menunjukkan hasil uji statistik t untuk variabel X5 memiliki nilai signifikansi  $0,3945 >$  nilai probabilitas  $\alpha = 5\%$ . Hal ini berarti bahwa secara individual Ukuran Kabupaten/Kota yang diproksikan dengan jumlah populasi penduduk Kabupaten/Kota dalam sampel penelitian tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal. Hipotesis kelima penelitian tidak didukung oleh hasil pengujian statistik. Nilai koefisien hasil regresi di atas menunjukkan tanda negatif sehingga pengaruh Ukuran Kabupaten/Kota sebenarnya berbanding terbalik terhadap Anggaran Belanja Modal.

Hasil penelitian di atas sesuai dengan teori keagenan dimana Ukuran Kabupaten/Kota yang diproksikan dengan jumlah populasi adalah cerminan dari prinsipal yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan guna memenuhi kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ukuran Kabupaten/Kota yang menjadi salah satu faktor determinan Anggaran Belanja Modal suatu daerah belum secara

signifikan memengaruhi besaran Anggaran Belanja Modal. Hal tersebut dikarenakan jumlah populasi dalam suatu daerah tidak terkomposisi sebagai penduduk asli daerah tersebut. Banyak dari jumlah populasi suatu daerah terdiri dari penduduk asli daerah dan pendatang. Para pendatang dan penduduk asli daerah juga terdiri dari beberapa kelompok usia sehingga bagi para penduduk suatu daerah dengan kelompok usia yang sangat beragam belum cukup signifikan memengaruhi belanja modal suatu daerah. Selain hal tersebut, tingkat pendidikan suatu populasi di suatu daerah juga belum merata dan akses pengetahuan tentang belanja modal yang dianggarkan dalam APBD juga belum secara menyeluruh dipahami oleh penduduk daerah tersebut.

Pemerintah daerah yang bertindak sebagai agen berperan dalam mewujudkan keterbukaan informasi dan pengetahuan mengenai belanja modal dalam APBD yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan dari masyarakat daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan peran dan tanggung jawabnya untuk membangun infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan, pembangunan fasilitas pendidikan dalam rangka peningkatan pembangunan manusia, pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan dan lain sebagainya.

Tabel 4.15 dibawah ini menunjukkan rekapitulasi hasil penelitian regresi data panel yang menguji hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara individual (Uji Statistik t).

**Tabel 4. 15 Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis t Statistik**

Variabel Independen (X)	Variabel Dependen Y (Anggaran Belanja Modal)		Keterangan
	Arah	Signifikansi	Hipotesis
Anggaran Dana Alokasi Khusus (X1)	Positif	Signifikan	Didukung
Anggaran Dana Alokasi Umum (X2)	Negatif	Tidak Signifikan	Tidak Didukung
Anggaran Pendapatan Asli Daerah (X3)	Positif	Signifikan	Didukung
Anggaran Dana Bagi Hasil (X4)	Negatif	Signifikan	Tidak Didukung
Ukuran Kabupaten/Kota (X5)	Negatif	Tidak Signifikan	Tidak Didukung

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian dari hasil pengujian statistik yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Determinan Anggaran Belanja Modal yang secara positif dan signifikan adalah Anggaran Dana Alokasi Khusus dan Anggaran Pendapatan Daerah.
2. Anggaran Dana Alokasi Umum dan Ukuran Kabupaten/Kota tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.
3. Anggaran Dana Bagi Hasil berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal.

#### **V.2 Implikasi Penelitian**

Penelitian yang telah dilakukan memiliki beberapa implikasi sebagai berikut.

1. Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah telah dilakukan sesuai fungsi pemerintah daerah sebagai agen dari masyarakat daerah. Hal ini tercermin dari penggunaan Anggaran Daerah yang terdiri dari Anggaran Dana Alokasi Khusus dan Anggaran Pendapatan Daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai Pengeluaran Belanja Modal yang telah dianggarkan pemerintah daerah dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setiap tahunnya. Pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan informasi terkait penggunaan anggaran terutama pada Anggaran Dana Alokasi Umum dan Anggaran Dana Bagi Hasil agar masyarakat percaya dengan kinerja dari pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal tersebut dianggap penting karena berdasarkan hasil penelitian Anggaran Dana Alokasi Umum dan Anggaran Dana Bagi Hasil belum mencerminkan penggunaan anggaran tersebut untuk pembelanjaan modal daerah guna meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan kepentingan masyarakat daerah.
2. Dalam hal semakin bertambahnya populasi penduduk di suatu daerah, pemerintah daerah sebaiknya berperan dalam hal melayani kebutuhan setiap masyarakat daerah tanpa terkecuali dimana pelayanan tersebut dapat memiliki dampak positif jika pemerintah daerah berhasil melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat daerahnya. Setiap bertambahnya populasi jumlah penduduk suatu daerah

mengindikasikan suatu daerah tersebut memiliki daya tarik bagi penduduknya dengan salah satunya adalah peningkatan aktivitas ekonomi daerah tersebut. Jika pemerintah daerah dapat melayani kebutuhan dari masyarakat daerah yang bertambah seiring peningkatan jumlah populasi mereka, maka dampak yang dapat diambil dari hasil pelayanan kepada masyarakat yang maksimal adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Salah satu bentuk pelayanan pemerintah daerah kepada penduduk daerah adalah penggunaan Anggaran Belanja Daerah yang memprioritaskan Belanja Modal untuk pemenuhan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

3. Hasil penelitian juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah pusat dalam hal pembuatan paket kebijakan kepada pemerintah daerah agar penggunaan anggaran daerah sesuai dengan tujuan dari dianggarkannya anggaran tersebut. Penggunaan anggaran daerah yang belum sesuai peruntukannya dapat diatur oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sehingga kebutuhan dan kepentingan masyarakat daerah terpenuhi dengan baik dan maksimal.
4. Penelitian ini berkontribusi terhadap kurangnya studi yang membahas topik determinan Anggaran Belanja Modal. Penelitian ini memberikan tambahan studi yang masih jarang tentang topik deviasi belanja modal (Haraldsson, 2022). *Gap* tahun yang panjang terhadap penelitian topik ini membuat studi yang dilakukan sekarang menambah referensi penelitian bertema determinan anggaran belanja modal. Penelitian ini juga memberikan gambaran baru tentang Ukuran Kabupaten/Kota sebagai salah satu determinan yang secara bersama-sama memengaruhi Anggaran Belanja Modal di suatu Kabupaten/Kota. Ukuran Kabupaten/Kota yang diukur dalam jumlah populasi menambah pemahaman lebih luas dan jauh sebagai determinan Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota. Ukuran Kabupaten/Kota ini menambah determinan lain yang memengaruhi Anggaran Belanja Modal yang telah dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya.

### **V.3 Keterbatasan**

Keterbatasan penelitian ini adalah berfokus pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang membuat hasil penelitian perlu diuji kembali dengan luas sampel yang lebih banyak seperti penggunaan pemerintahan kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. Hasil penelitian yang spesifik tersebut membuat generalisasi hasil perlu dikuatkan dengan penelitian-penelitian di kemudian hari. Keterbatasan penelitian dengan hasil penelitian

pada objek yang spesifik membuat keraguan tentang generalisasi temuan penelitian (Haraldsson, 2022). Variabel Anggaran Dana Alokasi Umum dapat diukur dengan proksi lain di luar angka anggaran dalam APBD dan LRA. Determinan Ukuran Kabupaten/Kota dapat ditambah atau diganti dengan proksi lainnya agar terlihat signifikansi pengaruh variabel tersebut terhadap Anggaran Belanja Modal.

#### **V.4 Penelitian Masa Akan Datang**

Penelitian yang dapat dilakukan selanjutnya adalah penelitian dengan membandingkan anggaran belanja modal antara negara maju dengan negara berkembang atau antar negara berkembang. Isu terkait penelitian bertema belanja modal masih sangat terbuka dan studi tentang topik tersebut masih sangat terbatas (Haraldsson, 2022).

Isu menarik lain untuk dapat diteliti di kemudian hari adalah bagaimana proses penganggaran terlebih belanja modal dilakukan oleh tingkatan pemerintahan baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga negara. Perilaku para pembuat anggaran juga menjadi isu menarik untuk diteliti lebih lanjut karena pentingnya dampak hasil penelitian topik tersebut terhadap kontribusi teori dan praktis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bacchiocchi, E., Borghi, E., & Missale, A. (2011). Public Investment under Fiscal Constraints\*. *Fiscal Studies*, 32(1), 11–42. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5890.2011.00126.x>
- Basuki, A. T., & Yuliadi, I. (2014). *Elektronik Data Prosesing (SPSS 15 dan EViews 7)*. Danisa Media.
- Baswir, R. (2000). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia (Ketiga, Vol. 7)*. BPFE.
- Benito, B., Guillamón, M., & Bastida, F. (2015). Budget Forecast Deviations in Municipal Governments: Determinants and Implications. *Australian Accounting Review*, 25(1), 45–70. <https://doi.org/10.1111/auar.12071>
- BPK Kalbar. (n.d.). *Mengendap Dana Pemda Rp. 233,8 T*. Retrieved October 6, 2023, from <https://kalbar.bpk.go.id/mengendap-dana-pemda-rp-2338-t/>
- Cantarelli, C. C., Flyvbjerg, B., van Wee, B., & Molin, E. J. E. (2008). Cost overruns in large-scale transportation infrastructure projects: Which explanations can be given? *2008 First International Conference on Infrastructure Systems and Services: Building Networks for a Brighter Future (INFRA)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/INFRA.2008.5439650>
- Christofzik, D. I. (2019). Does accrual accounting alter fiscal policy decisions? - Evidence from Germany. *European Journal of Political Economy*, 60, 101805. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.07.003>
- Collin, S., Haraldsson, M., Tagesson, T., & Blank, V. (2017). Explaining municipal audit costs in Sweden: Reconsidering the political environment, the municipal organisation and the audit market. *Financial Accountability & Management*, 33(4), 391–405. <https://doi.org/10.1111/faam.12130>
- Dorn, F., Gaebler, S., & Roesel, F. (2021). Ineffective fiscal rules? The effect of public sector accounting standards on budgets, efficiency, and accountability. *Public Choice*, 186(3–4), 387–412. <https://doi.org/10.1007/s11127-019-00755-8>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74. <https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19* (5th ed.). UNDIP Press.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. (2004). *Basic Econometrics (Ekonometrika Dasar) Alih Bahasa Sumarno Zain*. Penerbit Erlangga.

- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika alih bahasa Raden Carlos Mangunsong* (5th ed., Vol. 2). Salemba Empat.
- Halim, A. (2002). *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah* (Pertama). UPP AMP YKPN.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2003). Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja Pemerintah Daerah: Studi kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Simposium Nasional Akuntansi VI*, 1140–1159.
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2007). *Managerial Accounting* (J. W. Calhoun, Ed.; Eighth). Thomson.
- Haraldsson, M. (2022). Capital expenditure deviations in a fragmented municipal context – the case of the Swedish municipal water and sewerage sector. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 34(6), 26–45. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-12-2020-0197>
- Heliyanto, F., & Handayani, N. (2016). Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(3).
- Isnaini, A., Nur Saviah, S., & Ratnasari, E. D. (2023). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Tenaga Kerja, Rasio Ketergantungan dan Rasio Jenis Kelamin terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah Tahun 2015-2021. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 3(3).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh PAD, DAU DAN DAK terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3), 1255. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i03.p05>
- Kosmaryati, Handayani, C. A., Isfahani, R. N., & Widodo, E. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia Tahun 2011-2016 dengan Regresi Data Panel. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 2(1).
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* (4th ed.). Penerbit Erlangga.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Keempat, Vol. 1). UPP STIM YKPN.
- Mardani, R. (2019, September 11). *Uji Asumsi Klasik untuk Regresi Data Panel*. <https://mjurnal.com/skripsi/uji-asumsi-klasik-untuk-regresi-data-panel/>
- Mufida, B. A., & Suryono, B. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(6).

- Mutiah, & Mappanyuki, R. (2015). The Effect of Surplus Budget Financing, Special Allocation Fund, General Allocation Fund, Regional Revenue, and Characteristics of Local Government on Decision of Capital Expenditure (Survey in Local Government in Indonesia). *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(9).
- Nachrowi, & Usman. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Lembaga Penerbit FE UI.
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Tobing, C. E. R. L. (2021). *Penelitian Bisnis Teknik dan Analisa Data dengan SPSS - STATA - Eviews* (1st ed.). Madenatera.
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034>
- Nurhidayati, L. L., & Yaya, R. (2013). Alokasi belanja modal untuk pelayanan publik: praktik di pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(2), 102–114. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.iss2.art2>
- Nurzen, M., & Riharjo, I. B. (2016). Nurzen, M., & Riharjo, I. B. (2016). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(4).
- Nuzana, M., & Riharjo, I. B. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(10).
- Pebriyanti, E. (2015). The Effect of Bank Soundness Ratio, Systematic Risk and Macroeconomis toward Stock Return. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2).
- Pelealu, A. M. (2013). Pengaruh dana alokasi khusus (DAK), dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal pemerintah kota Manado tahun 2003-2012. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4).
- Permatasari, I., & Mildawati, T. (2016). Pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja modal pada kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(1).
- Renita, S. (2019). *Pengaruh Produksi Beras, Harga Beras, Tingkat Konsumsi Beras terhadap Impor Beras di Indonesia Tahun 2011 - 2017 (Studi Kasus 33 Provinsi)*.
- Rizal, Y., & Erpita. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 74–83.
- Sholikhah, I., & Wahyudin, A. (2014). Analisis belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).

- Siburian, S., & Aptanta Henanda Sari, F. (2022). Analisis Data Panel Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2015. *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation*, 2(2).
- Sugiardi, N. P. D. E. R., & Supadmi, N. L. (2014). Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(2), 477–495.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumardjoko, I., & Irwanto, A. (2015). Peran Transfer Dana Penyesuaian dan Dana Perimbangan Terhadap Peningkatan Belanja Modal Daerah Untuk Menciptakan Quality Spending. Simposium Nasional Akuntansi 18.
- Tri Basuki, A., & Prawoto, N. (2015). Analisis Komposisi Pengeluaran Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Mendukung Good Governance Dalam Memasuki MEA (Studi Empiris Propinsi Di Indonesia Tahun 2010- 2014). *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Tuasikal, A. (2008). Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 1(2), 124–142.
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika : Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan EViews* (4th ed.). UPP STIM YKPN.
- Winarno, W. W. (2017). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews* (5th ed., Vol. 1). UPP STIM YKPN Yogyakarta.

## LAMPIRAN

### Sampel Penelitian

Kabupaten/Kota	Tahun	Anggaran Belanja Modal	Anggaran DAK	Anggaran DAU	Anggaran PAD	Anggaran DBH	Jumlah Populasi Penduduk
Kabupaten Blora	2015	346,504.65	103,527.76	848,823.61	137,375.00	96,097.06	852,088
	2016	482,906.15	307,992.65	943,325.50	175,200.00	103,455.49	855,573
	2017	449,206.07	341,683.41	926,754.30	268,303.89	123,244.14	858,865
	2018	540,298.52	338,978.18	926,754.30	199,199.81	132,833.45	862,110
	2019	507,651.03	383,711.08	966,572.99	218,052.93	147,660.14	865,013
Kabupaten Boyolali	2015	330,818.59	88,959.52	968,089.63	242,348.84	44,079.84	963,690
	2016	396,101.47	289,572.01	1,032,744.00	273,242.12	44,180.46	969,325
	2017	443,972.27	325,805.10	1,014,602.02	362,931.49	47,275.91	974,579
	2018	521,345.46	376,129.67	1,014,602.02	329,616.58	47,077.85	979,799
	2019	555,017.95	360,784.91	1,045,669.92	364,528.45	45,543.72	984,807
Kabupaten Grobogan	2015	345,415.29	131,245.95	1,008,901.50	239,705.29	50,321.48	1,351,429
	2016	565,746.67	476,361.12	1,110,337.03	268,933.42	52,394.53	1,444,202
	2017	674,679.06	425,658.31	1,091,590.53	440,891.89	59,946.78	1,449,791
	2018	465,515.64	400,743.05	1,094,460.43	316,106.91	44,444.65	1,459,780
	2019	469,517.60	416,945.73	1,135,650.52	337,422.01	43,799.63	1,473,431
Kabupaten Kendal	2015	334,706.18	72,946.52	884,901.57	197,365.17	59,934.53	952,966
	2016	404,209.26	270,059.64	873,744.12	263,274.26	55,469.87	961,989
	2017	381,665.55	299,040.40	955,860.93	395,818.88	58,676.86	978,672
	2018	347,740.54	306,531.10	956,765.78	338,052.93	49,174.76	991,686
	2019	330,894.36	339,965.36	994,229.26	412,512.72	49,322.44	1,011,939
Kabupaten Pemalang	2015	345,430.63	110,616.99	1,058,982.53	209,093.27	41,069.21	1,288,566
	2016	345,161.25	422,210.86	1,197,916.50	246,679.82	37,993.31	1,292,573
	2017	451,272.32	360,639.19	1,197,916.50	405,333.93	40,591.36	1,296,272
	2018	409,609.49	356,263.95	1,180,834.33	275,431.37	38,074.06	1,299,433
	2019	478,827.13	370,775.23	1,223,060.21	297,127.16	31,472.68	1,302,814
Kabupaten Purworejo	2015	257,530.68	90,023.97	875,528.05	199,690.78	32,571.24	710,435
	2016	309,551.42	344,236.93	1,100,146.08	235,315.08	33,668.98	712,686
	2017	497,241.37	211,213.03	924,251.80	269,067.90	36,610.58	774,117
	2018	377,024.97	308,339.59	924,251.80	278,952.39	31,642.09	785,451
	2019	337,582.44	319,297.30	960,347.17	294,463.08	26,508.14	793,552
Kabupaten Rembang	2015	234,216.28	123,024.26	723,091.45	184,956.74	35,792.97	621,134
	2016	427,734.93	159,845.21	671,800.49	217,796.93	34,257.26	626,136
	2017	419,803.69	127,505.94	771,584.37	308,606.44	43,427.89	628,901

	2018	350,720.26	104,441.99	771,584.37	304,351.91	46,858.07	635,796
	2019	245,296.26	244,204.76	799,760.39	310,601.59	50,834.17	638,190
Kabupaten Semarang	2015	300,448.00	40,651.68	876,672.93	253,179.59	46,128.89	961,421
	2016	416,593.46	497,012.16	968,848.03	301,041.79	45,012.71	1,014,198
	2017	376,831.63	299,630.18	930,094.11	363,698.93	50,919.66	1,024,706
	2018	460,182.45	323,579.01	952,362.15	372,861.72	46,944.83	1,036,929
	2019	435,757.89	339,255.10	1,001,565.38	407,019.49	43,418.83	1,049,002
Kabupaten Sukoharjo	2015	346,958.61	72,495.33	854,457.64	264,982.26	30,990.67	875,917
	2016	362,327.71	421,248.14	788,980.78	314,896.57	38,340.08	871,397
	2017	396,931.11	311,712.48	906,416.63	391,127.04	43,525.25	878,374
	2018	469,598.83	302,966.03	906,416.63	348,388.68	35,589.30	885,205
	2019	534,575.10	303,685.88	938,959.82	359,679.15	26,525.64	891,912
Kabupaten Wonogiri	2015	342,816.00	86,116.27	1,031,393.47	193,075.58	37,289.05	949,017
	2016	474,005.63	316,855.50	1,145,434.28	195,059.31	35,233.04	951,975
	2017	536,494.36	394,061.18	1,125,312.68	300,922.36	36,922.54	954,706
	2018	431,357.20	395,201.65	1,125,312.68	239,351.10	32,622.18	957,106
	2019	593,770.78	427,195.76	1,173,233.18	261,603.47	29,538.73	959,490
Kabupaten Wonosobo	2015	344,120.49	70,677.18	748,447.76	154,515.66	35,071.16	777,116
	2016	375,905.06	343,438.47	841,407.18	177,947.57	38,219.81	780,667
	2017	456,034.62	291,928.14	826,626.36	210,138.74	39,411.17	784,091
	2018	493,421.79	284,687.57	827,791.66	212,079.48	38,589.24	787,347
	2019	502,386.43	350,559.64	872,953.36	227,435.36	34,499.59	790,491
Kota Magelang	2015	188,977.01	32,218.45	418,257.92	152,806.00	24,457.72	120,995
	2016	246,508.67	111,614.16	415,469.41	197,465.48	29,017.55	121,205
	2017	271,948.24	103,562.43	440,041.24	218,085.19	33,063.55	121,673
	2018	281,978.83	113,246.36	440,041.24	225,916.33	30,321.94	121,872
	2019	290,731.82	110,700.48	456,177.03	242,434.30	24,706.00	122,111
Kota Semarang	2015	1,349,349.49	52,100.33	1,126,847.63	1,107,053.26	127,481.00	1,595,267
	2016	1,229,919.02	255,682.44	992,311.19	1,337,039.53	199,704.89	1,602,717
	2017	1,412,600.30	306,803.47	1,190,422.39	1,692,399.10	209,937.30	1,610,605
	2018	1,329,167.87	79,710.94	1,190,422.39	1,811,352.29	207,663.34	1,668,578
	2019	3,749,437.49	339,392.68	1,288,423.92	2,128,176.14	173,370.47	1,689,655
Kota Surakarta	2015	252,000.42	3,750.10	713,300.86	361,019.67	55,842.80	512,226
	2016	335,599.99	374,229.79	841,536.12	394,200.86	73,922.78	514,171
	2017	511,701.53	193,560.72	816,290.04	492,503.91	75,789.51	516,102
	2018	562,865.29	216,979.15	826,753.04	505,328.29	61,910.23	517,887
	2019	570,452.10	218,740.04	866,227.25	567,757.96	47,729.80	519,587

**Hasil Output Regresi *Fixed Effect Model Cross-section Weights* (Perbaikan Heteroskedastisitas)**

Dependent Variable: Y				
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)				
Date: 11/15/23 Time: 14:14				
Sample: 2015 2019				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 14				
Total panel (balanced) observations: 70				
Linear estimation after one-step weighting matrix				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1173370.0	700188.2	1.675793	0.0999
X1	0.246805	0.112374	2.196276	0.0326
X2	-0.377258	0.291818	-1.292782	0.2019
X3	1.459031	0.268028	5.443568	0.0000
X4	-6.439741	1.962491	-3.281411	0.0019
X5	-0.614389	0.715515	-0.858666	0.3945
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.805075	Mean dependent var	911388.6	
Adjusted R-squared	0.736278	S.D. dependent var	640140.0	
S.E. of regression	158753.0	Sum squared resid	1.29E+12	
F-statistic	11.70220	Durbin-Watson stat	1.90665	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.846305	Mean dependent var	508781.0	
Sum squared resid	2.23E+12	Durbin-Watson stat	1.93451	

### Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled Test cross-section fixed effects			
Effects Tests	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.122911	(13,51)	0.0018
Cross-section Chi-square	40.990751	13	0.0001

### Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	32.912432	5	0.0000

### Hasil Regresi *Fixed Effect Model* sebelum Perbaikan Heteroskedastisitas

Dependent Variable: Y Method: Panel Least Squares Date: 11/14/23 Time: 14:00 Sample: 2015 2019 Periods included: 5 Cross-sections included: 14 Total panel (balanced) observations: 70				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2381718.0	1447753.0	1.645114	0.1061
X1	0.430667	0.290655	1.481715	0.1446
X2	-0.734887	0.649631	-1.131238	0.2632
X3	2.377775	0.328802	7.231641	0.0000
X4	-11.845250	2.467976	-4.799579	0.0000
X5	-1.663711	1.465018	-1.135625	0.2614

### Hasil Uji Glejser

Dependent Variable: RESABS				
Method: Panel Least Squares				
Date: 11/14/23 Time: 14:18				
Sample: 2015 2019				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 14				
Total panel (balanced) observations: 70				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-596753.5	566386.6	-1.053615	0.2970
X1	-0.276326	0.113709	-2.430108	0.0187
X2	0.113910	0.254147	0.448205	0.6559
X3	0.543698	0.128633	4.226740	0.0001
X4	0.632218	0.965516	0.654798	0.5155
X5	0.456326	0.573141	0.796185	0.4296